



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**SENADA**  
INDONESIA COMPETITIVENESS PROGRAM

# STUDI HAMBATAN KEBIJAKAN BAGI INDUSTRI FURNITUR

HASIL STUDI DI JAWA TIMUR DAN JAWA TENGAH

**AUGUST 2007 – REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT INDONESIA (REDI)**

LAPORAN INI DISUSUN UNTUK DITELAAH OLEH THE UNITED STATES  
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. LAPORAN INI DISUSUN OLEH **DAI**.

# STUDI HAMBATAN BAGI INDUSTRI FURNITUR

HASIL STUDI DI JAWA TIMUR DAN JAWA TENGAH

**PERNYATAAN**

PANDANGAN YANG DIMUAT DALAM LAPORAN INI TIDAK MENCERMINKAN  
PANDANGAN THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL  
DEVELOPMENT MAUPUN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT.

# DAFTAR ISI

---

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>Bagian I – Pendahuluan .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Penelitian .....	6
<b>Bagian II – Metode Studi .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tahapan Studi .....	7
2.1.1. Focus Group Discussion Awal .....	7
2.1.2. Pertemuan koordinasi dengan Senada dan ASMINDO .....	7
2.1.3. Review studi sebelumnya .....	7
2.1.4. Desain instrumen studi.....	7
2.1.4. Finalisasi instrumen studi.....	8
2.1.5. Penentuan responden .....	8
2.1.6. In-depth Interview .....	8
2.1.7. FGD (Focus Group Discussion) .....	8
2.1.8. Penulisan draft report .....	8
2.1.9. Review draft report .....	8
2.1.10. Finalisasi laporan akhir .....	8
2.2. Metode Penentuan Responden.....	8
2.3. Teknik Analisis.....	8
2.4. Data .....	9
<b>Bagian III – Temuan Studi 1 : Hambatan Kebijakan Impor Barang Contoh.....</b>	<b>10</b>
3.1. Analisis Kebijakan Impor Barang Contoh.....	10
3.2. Analisis Manfaat dan Biaya Kebijakan Impor Barang Contoh.....	12
<b>Bagian IV – Temuan Studi 2 : Hambatan Prosedur Karantina Bahan Baku.....</b>	<b>5</b>
4.1. Analisis Kebijakan Prosedur Karantina Bahan Baku .....	15
4.2. Analisis Manfaat dan Biaya Kebijakan Karantina Produk MDF.....	17
<b>Bagian V – Temuan Studi 3 : Hambatan Dalam Kebijakan Minimum Order BBM ..</b>	<b>18</b>
<b>Bagian VI – Temuan Studi 4 : Hambatan dalam Perdagangan Kayu Antar Daerah....</b>	<b>20</b>
6.1. Hambatan dalam Perdagangan Kayu dan Produk Kayu Antar Daerah .....	20
6.1.1. Kebijakan Umum Penatausahaan Hasil Hutan.....	20
6.1.2. Tata Niaga Kayu Bulat.....	21
6.1.3. Tata Niaga Kayu Olahan.....	25
6.2. Analisis Kebijakan Tata Niaga Kayu .....	25
6.3. Hambatan Perdagangan Produk Kayu Antar Daerah.....	28
6.4. Analisis Biaya dan Manfaat Hambatan .....	29
<b>Bagian VII Temuan Studi 5 : Hambatan Yang Terkait Peraturan Pusat.....</b>	<b>31</b>
7.1. Kebijakan Daerah dan Pajak Daerah Bagi Industri Furnitur.....	31
7.2. Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	32
7.3. Analisis Dampak Kebijakan Daerah dan Pajak Daerah Bagi Industri Furnitur.....	32

<b>Bagian VIII Kesimpulan dan Rekomendasi.....</b>	<b>33</b>
8.1 Kesimpulan.....	33
8.2 Rekomendasi.....	33
8.2.1. Rekomendasi terkait Policy Review.....	33
8.2.2. Rekomendasi terkait Implementasi Kebijakan.....	34
<b>Kepustakaan .....</b>	<b>35</b>

# DAFTAR SINGKATAN

---

ASMINDO	Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia ( <i>Furniture and Handicraft Association</i> )
BBM	Bahan Bakar Minyak
BU	Buku Ukur DHH = Daftar Hasil Hutan
DHHBK	Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu
DKB	Daftar Kayu Bulat
DKBK	Daftar Kayu Bulat Kecil
DKO	Daftar Kayu Olahan
DLAHH	Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan
DLHP	Daftar Laporan Hasil Penebangan
DPPHH	Daftar Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan
DP	Daftar Pengangkutan
DPP	Daftar Pengangkutan Pengganti
FA-BBS	Faktur Angkutan Kayu Bahan Baku Serpih
FA-HHBK	Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
FA-KB	Faktur Angkutan Kayu Bulat
FA-KO	Faktur Angkutan Kayu Olahan
FGD	Focus Group Discussion
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HHK	Hasil Hutan Kayu
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPHT	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
HPHTI	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
IPK	Izin Pemanfaatan Kayu
IPKL	Industri Pengolahan Kayu Lanjutan
IPHHK	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
IPHHBK	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
ISPM	<i>International Standards for phytosanitary measures</i>
IUIPHHBK	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
IUIPHHK	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IUPHHBK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
HS	<i>harmonized system</i>
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KB	Kayu Bulat
KBK	Kayu Bulat Kecil
KBS	Kayu Bulat Sedang
KO	Kayu Olahan
LHC	Laporan Hasil Cruising
LHP	Laporan Hasil Penebangan
LHP-KB	Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
LHP-KBK	Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil
LMHH	Laporan Mutasi Hasil Hutan
LMHHBK	Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu
LMHHOBK	Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu
LMHHO	Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan
LMHHOK	Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu
LMKB	Laporan Mutasi Kayu Bulat

LMKKBK	Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil
LMKO	Laporan Mutasi Kayu Olahan
LP-HHBK	Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
MDF	<i>Medium Density Fibreboard</i>
P2SKSKB	Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
P2SKSHH	Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
P2LHP	Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
P2LP-HHBK	Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
P3KB	Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
RPHH	Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan
SKAU	Surat Keterangan Asal Usul
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
TPn	Tempat Pengumpulan Kayu
TPK	Tempat Penimbunan Kayu
TPKA	Tempat Penimbunan Kayu Antara
TPKI	Tempat Penimbunan Kayu Industri

# KATA PENGANTAR

---

Studi ini bisa dilaksanakan oleh Regional Economic Development Institute (REDI) atas dukungan dari SENADA-USAID.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam melalui *in-depth* analysis tentang hambatan yang dihadapi industri furnitur, baik hambatan yang disebabkan oleh suatu kebijakan maupun hambatan selain karena faktor kebijakan. Sebelumnya tim SENADA telah melakukan diskusi terbatas dengan beberapa pengusaha furnitur tentang berbagai hambatan yang saat ini dihadapi industri furnitur. Berdasarkan hasil diskusi tersebut teridentifikasi beberapa hambatan eksternal yang dihadapi industri furnitur, yaitu: (1) perlakuan barang contoh yang hampir mirip dengan barang impor pada umumnya, (2) proses karantina terhadap bahan mentah meskipun telah diolah, (3) kebijakan minimum order BBM yang jumlahnya sangat besar, 4) hambatan dalam perdagangan antar daerah, khususnya terhadap kayu dan produk kayu, dan (5) Peraturan daerah dan pajak daerah.

Studi ini dilakukan melalui beberapa *in-depth* interview terhadap pengusaha furnitur di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan *focus group discussion* (FGD) di kedua lokasi studi tersebut. Hasil temuan awal studi ini juga disampaikan dalam workshop di Semarang dan Surabaya.

Tim peneliti REDI menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya studi ini, perwakilan Asmindo Jawa Timur, Asmindo Jepara, Asmindo Solo Raya, perwakilan perusahaan furnitur, UKM sektor furnitur, instansi pemerintah, dan beberapa lembaga donor.

**Tim Peneliti :**

Indra N. Fauzi  
Lyla Rachmaningtyas  
Rumayya  
Chilman Suaidi

# I. RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir furnitur terbesar di dunia. Tahun 2006 posisi ekspor produk furnitur Indonesia di dunia berada pada peringkat 8 dengan urutan dari peringkat tertinggi Cina, Kanada, Meksiko, Itali, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan. Berdasarkan data perkembangan nilai ekspor Indonesia, ekspor produk kayu yang berupa *dining, living, shop and others* (outdoor) (HS 940360) merupakan produk ekspor terbesar. Nilainya selalu mengalami peningkatan seperti yang terlihat dari tahun 2000 sampai 2006. Tahun 2006 menunjukkan perkembangan sebesar 816 juta US\$ dengan produk sejumlah 316.6. Produk kedua yang juga menjadi unggulan Indonesia di pasar internasional adalah *bedroom* (HS 940350) dengan nilai di tahun 2006 sebesar 190.65 juta US\$.

Industri furnitur mempunyai peranan penting bagi perekonomian, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan industri furnitur mempunyai *value chain* yang sangat panjang dan terkait dengan berbagai sektor yang lain. Dalam arti *multiplier effect* yang dihasilkan dari industri ini sangat besar, yaitu mulai dari pengrajin yang mensupply barang setengah jadi ke pengusaha, pedagang kayu, pengusaha bahan-bahan pendukung industri furnitur sampai pada penjual makanan, kios, wartel dan hotel yang berada di sekeliling industri tersebut yang sifatnya *cluster*.

Meskipun peranan cukup penting, industri furnitur masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi daya saing komoditas ini. Kesimpulan ini muncul sebagai hasil dari serangkaian diskusi antara SENADA dan ASMINDO di Surabaya. Hasil diskusi tersebut memperlihatkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi industri furnitur, baik yang terkait dengan kebijakan pemerintah maupun bukan. Identifikasi yang dilakukan ASMINDO terkait dengan tantangan yang menyebabkan usaha mereka tidak dapat tumbuh lebih cepat dan mempunyai daya saing, baik di pasar internasional maupun domestik adalah : (1) perlakuan barang contoh yang hampir mirip dengan barang impor pada umumnya, (2) proses karantina terhadap bahan mentah meskipun telah diolah, (3) kebijakan minimum order BBM yang jumlahnya sangat besar, 4) hambatan dalam perdagangan kayu dan produk kayu antar daerah, dan (5) Peraturan daerah dan pajak daerah.

Terkait dengan hasil identifikasi awal tersebut studi ini menghasilkan beberapa temuan yang lebih mendalam. Temuan-temuan studi ini terkait langsung dengan permasalahan kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Kebijakan impor barang contoh yang saat ini diterapkan dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 140/1997 memberikan kontribusi pada turunnya daya saing industri furnitur. Turunnya daya saing tersebut dikarenakan adanya perlakuan impor produk contoh yang hampir mirip dengan barang impor pada umumnya. Beban bea masuk dan pajak yang harus dibayar untuk impor barang contoh lebih dari 60% dengan prosedur pembebasan bea masuk yang sangat rumit. Akibat kebijakan ini potensi kehilangan order ekspor mencapai Rp 485 milyar. Rekomendasi dari masalah ini adalah policy review terhadap KMK 140/1997 sehingga prosedur impor barang contoh menjadi lebih mudah dan murah.

Prosedur karantina untuk bahan baku yang dibutuhkan industri furnitur, khususnya *Medium Density Fibreboard* (MDF) juga masih rumit, meskipun sudah ada pembebasan *phytosanitari certificate*<sup>1</sup>. Pengusaha

---

<sup>1</sup> International Standards for phytosanitary measures (ISPMs) are prepared by the Secretariat of the International Plant Protection Convention (IPPC) as part of the United Nations Food and Agriculture Organizations global programme of policy and technical assistance in plant quarantine. The IPPC is an international treaty relating to plant health to which approximately 124 governments currently adhere. The purpose of the IPPC is to secure common and effective action to prevent the spread and introduction of pests of plants and plant products, and to promote appropriate measures for their control.

furnitur yang mengimpor MDF masih tetap diharuskan melaporkan ke balai karantina. Proses ini meskipun lebih sederhana tetap menimbulkan inefisiensi biaya dan waktu. Prosedur impor MDF bisa jauh lebih sederhana jika ada koordinasi antara Kantor Bea Cukai dan Balai Besar Karantina yang lebih baik. Rekomendasi dari permasalahan ini adalah perlu adanya keputusan Menteri Pertanian tentang pembebasan *phytosanitari certificate* dan pelaporan ke Balai Besar Karantina yang disampaikan ke Menteri Keuangan sehingga prosedur kepabeanan untuk MDF bisa lebih sederhana.

Masalah kebijakan suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri lebih banyak terkait dengan terbatasnya suplai BBM industri yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jika mengikuti kebijakan yang ada masalah BBM lebih terkait dengan gap antara kebutuhan industri dengan suplai minimal yang Pertamina bersedia memenuhi. Selain itu persoalan keterbatasan agen BBM industri yang masih terbatas juga dipermasalahkan oleh beberapa perusahaan serta ketidaktahuan pengusaha tentang agen-agen BBM industri di setiap daerah. Solusi utama tentu saja Pertamina harus menambah agen BBM industri khususnya di daerah-daerah yang memiliki konsentrasi industri tinggi. Selain itu sebagai alternatif solusi adalah optimalisasi SPBU sebagai *service point* BBM industri perlu dipertimbangkan

Masalah hambatan dalam perdagangan antar daerah, khususnya terhadap komoditas kayu hingga saat ini masih banyak terjadi. Pengusaha furnitur masih harus membayar biaya tambahan ketika proses distribusi bahan baku kayu maupun produk. Penyederhanaan kebijakan tata niaga kayu melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 yang menggantikan peranan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan FAKB dan FAKO belum mampu menghapuskan hambatan distribusi kayu dan produk kayu secara signifikan. Oleh karena itu sosialisasi lebih intensif mempunyai peran penting. Selain itu untuk mempercepat ketersediaan tenaga ahli di perusahaan yang berhak mengeluarkan FAKO intensitas pelatihan harus ditingkatkan dengan disertai peninjauan biaya pelatihan yang dinilai sangat besar.

Kebijakan pusat dan daerah, khususnya mengenai pajak dan retribusi masih ditemukan dalam studi ini. Persoalan yang banyak dipermasalahkan pengusaha lebih terkait dengan rasionalitas dasar pengenaan pajak dan konsistensi penerapannya.

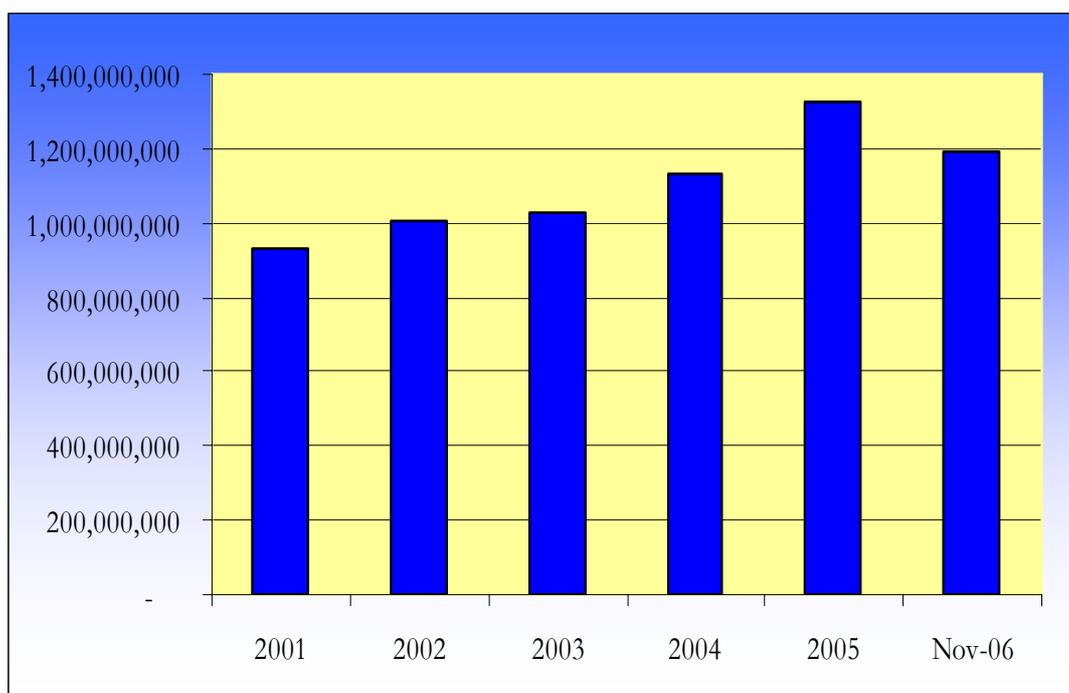
# I. BAGIAN I – PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir furnitur terbesar di dunia. Pada awal tahun 2000, Indonesia masuk dalam urutan ke 15 diantara eksportir furnitur di dunia. Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan 2006 posisi ekspor produk furnitur Indonesia di dunia berada pada peringkat 8 dengan urutan dari peringkat tertinggi Cina, Kanada, Meksiko, Itali, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan.

Industri furnitur telah memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dalam perkembangan ekspor furnitur Indonesia menurut data tahun 2001 sampai dengan 2006 yang menunjukkan trend meningkat. Pada tahun 2004 nilai ekspor furnitur Indonesia mencapai 1,129,502,649 US\$ dan meningkat sampai 1,326,300,209 US\$ pada tahun 2005. Pertumbuhan nilai ekspor furnitur Indonesia dari tahun 2004 dan 2005 sebesar 6,14%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor tersebut selama 6 tahun sebesar 7,37%.

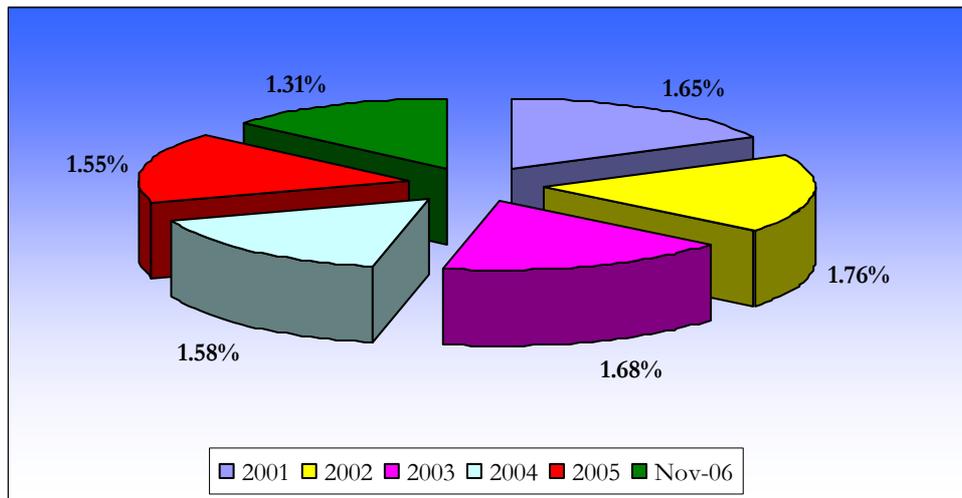
**GAMBAR 1.1— PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR FURNITUR INDONESIA TAHUN 2001-2006 (US\$)**



Sumber: BPS (diolah kembali)

Nilai ekspor furnitur apabila dibandingkan dengan nilai total ekspor Indonesia akan menghasilkan nilai pangsa ekspor furnitur. Pangsa ekspor furnitur terbesar terjadi di tahun 2002 yaitu sebesar 1,76%. Setahun kemudian pangsa ekspor furnitur menurun sampai dengan 1,68%. Proporsi nilai ekspor furnitur dibandingkan nilai total ekspor Indonesia kembali menurun tahun 2003 dan 2004 meskipun tidak signifikan. Rata-rata pangsa ekspor furnitur dari data tahun 2001 sampai 2005 diperoleh persentase sebesar 1,64%.

**GAMBAR 1.2 — PANGSA EKSPOR FURNITUR INDONESIA TAHUN 2001-2006**

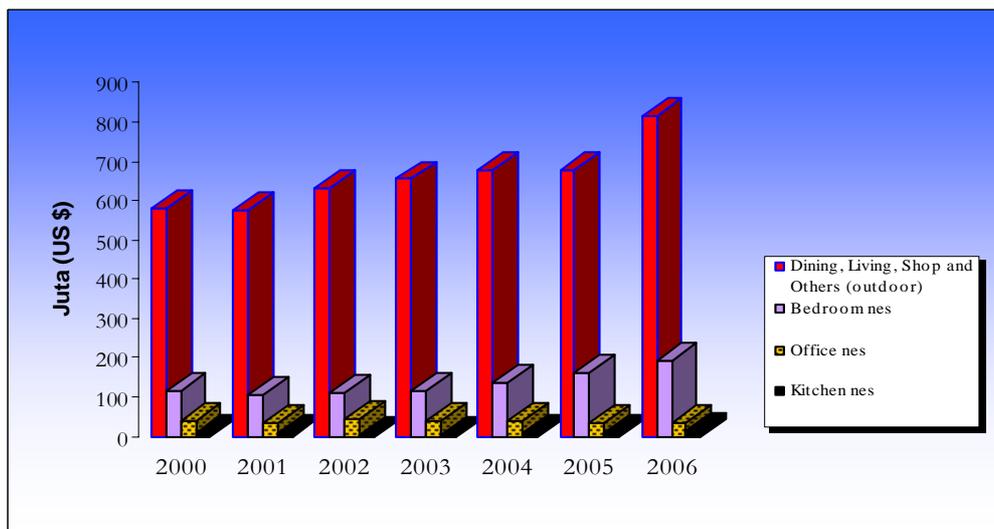


Sumber: BPS (diolah kembali)

Berdasarkan kode *harmonized system* produk furnitur kayu (HS 94.03) terdiri atas furnitur kayu (HS 94.03.30), furnitur dapur (HS 94.03.40), furnitur kamar tidur (HS 94.03.50) dan furnitur outdoor dengan kode HS 94.03.60 (*dining, living, shop and other wooden furniture*). Berdasarkan data perkembangan nilai ekspor Indonesia (Gambar 1.3), ekspor produk kayu HS 940360 merupakan produk ekspor primadona. Rata-rata pangsa produk furnitur outdoor terhadap total ekspor furnitur Indonesia ke dunia sebesar 79%. Nilai produk outdoor ini cenderung meningkat berdasarkan data tahun 2000 sampai tahun 2006. Pada tahun 2005 nilai ekspor produk furnitur outdoor Indonesia sebesar 677.82 juta US\$ dan pada tahun 2006 ekspor produk meningkat dengan nilai 816 juta US\$.

Ekspor furnitur andalan kedua Indonesia adalah furnitur kamar tidur. Secara rata-rata pangsa furnitur ini apabila dibandingkan dengan total ekspor produk furnitur adalah sebesar 16%. Nilai tertinggi pendapatan negara dari ekspor furnitur jenis ini diperoleh pada tahun 2006 yaitu sebesar 190.65%. Nilai tersebut meningkat sebesar 17,3% dari tahun sebelumnya.

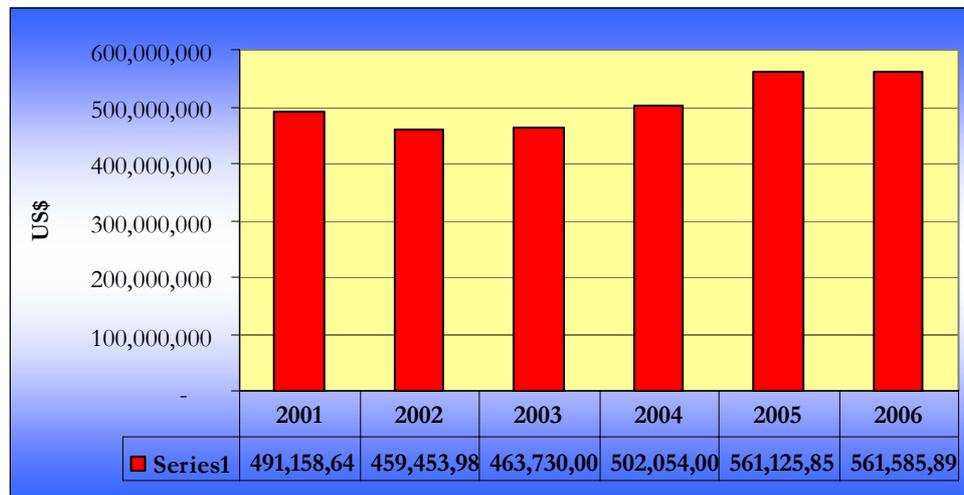
**GAMBAR 1.3 — EKSPOR FURNITUR INDONESIA (BERDASARKAN KODE HS)**



Sumber: BPS (diolah kembali)

Amerika merupakan pasar utama industri furnitur Indonesia. Pangsa pasar total produk furnitur ke Amerika (berdasarkan keempat kode HS) kurang lebih 35-37%. Ekspor furnitur outdoor ke Amerika memiliki pangsa pasar rata-rata 34% dari total ekspor furnitur outdoor. Sedangkan furnitur kamar tidur rata-rata sebesar 49% dari total ekspor furnitur kamar tidur.

**GAMBAR 1.4 — PERKEMBANGAN EKSPOR FURNITUR JAWA TIMUR**

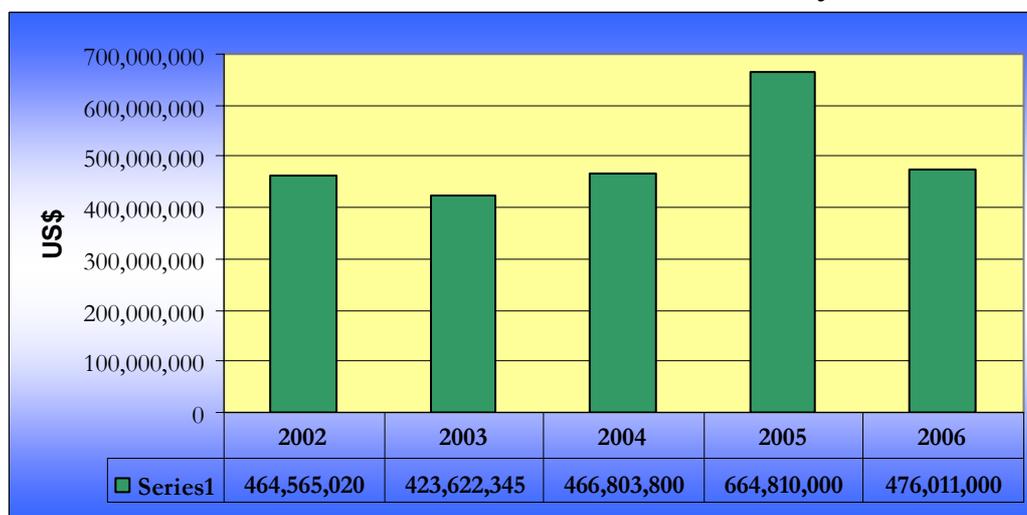


Sumber: Disperindag Jawa Timur (diolah kembali)

Jawa Timur menyumbang sekitar 46-50% industri furnitur secara nasional. Berdasarkan data perkembangan ekspor furnitur Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 2002 sampai 2006. Tahun 2002 nilai ekspor furnitur mencapai 459,453,980 US\$ dan sampai tahun 2006 nilai ekspor furnitur Jawa Timur mencapai 561,585,890 US\$. Rata-rata pertumbuhan ekspor Jawa Timur dari tahun 2001 sampai 2006 mencapai 4%.

Jawa Tengah memiliki pangsa pasar furnitur sebesar 31-35% terhadap total ekspor nasional. Perkembangan ekspor furnitur Jawa Tengah selama lima tahun berfluktuasi tetapi cenderung meningkat. Dalam perkembangannya ekspor paling signifikan yaitu pada tahun 2005, nilai ekspor mencapai 664,810,000 US\$ kemudian kembali menurun di tahun 2006 sampai mencapai 476,011,000 US\$. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor furnitur Jawa Tengah sama dengan pertumbuhan industri di Jawa Timur sebesar 4%.

**GAMBAR 1.5 — PERKEMBANGAN EKSPOR FURNITUR JATENG**



Sumber: Disperindag Jateng dan Asmindo Komda Jateng

Industri furnitur mempunyai peranan penting bagi perekonomian, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan industri furnitur mempunyai *value chain* yang sangat panjang dan terkait dengan berbagai sektor yang lain. Dalam arti *multiplier effect* yang dihasilkan dari industri ini sangat besar, yaitu mulai dari pengrajin yang mensupply barang setengah jadi ke pengusaha, pedagang kayu, pengusaha bahan-bahan pendukung industri furnitur sampai pada penjual makanan, kios, wartel dan hotel yang berada di sekeliling industri tersebut yang sifatnya *cluster*.

Selain beberapa kontribusi yang diberikan oleh industri furnitur tersebut ada hal lain yang tidak kalah penting sebagai bukti bahwa industri ini sangat penting bagi penggerak perekonomian, yaitu adanya kontribusi ekspor bagi perekonomian. Semakin besar volume dan nilai ekspor Indonesia maka semakin besar pula penerimaan negara dalam bentuk devisa sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan stabilitas perekonomian Indonesia.

Meskipun mempunyai peranan cukup penting, industri furnitur masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi daya saing komoditas ini diantara yang di temukan dalam serangkaian diskusi antara SENADA dan ASMINDO di Surabaya. Hasil diskusi tersebut memperlihatkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi industri furnitur, baik yang terkait dengan kebijakan pemerintah maupun bukan. Identifikasi yang dilakukan ASMINDO terkait dengan tantangan yang menyebabkan usaha mereka tidak dapat tumbuh lebih cepat dan mempunyai daya saing, baik di pasar internasional maupun domestik adalah : (1) perlakuan barang contoh yang hampir sama dengan barang impor pada umumnya, (2) proses karantina terhadap bahan baku (bahan mentah) meskipun telah diolah, (3) kebijakan minimum order BBM yang jumlahnya sangat besar, 4) hambatan dalam perdagangan kayu dan produk kayu antar daerah, dan (5) Peraturan daerah dan pajak daerah.

Dari hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu hambatan-hambatan tersebut dan dapat memberikan rekomendasi intervensi strategik bagi SENADA-USAID dan pihak-pihak terkait lainnya.

## 1.2 TUJUAN STUDI

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui hambatan kebijakan yang dialami industri furnitur yang terkait:

- Hambatan dalam mengimpor barang contoh yang diperlakukan hampir sama dengan barang impor pada umumnya,
- Hambatan dalam proses karantina bahan baku,
- Hambatan tentang kebijakan order minimum BBM,
- Hambatan perdagangan kayu dan produk kayu antar propinsi, dan
- Hambatan yang diakibatkan implementasi peraturan (daerah dan pusat) serta penerapan pajak daerah.

## 2. BAGIAN II – METODOLOGI

---

### 2.1 TAHAPAN STUDI

#### 2.1.1 FOCUS GROUP DISCUSSION AWAL

Studi ini diawali dengan adanya FGD antara Senada dan Asmindo Jawa Timur tanggal 10 Januari 2007 mengenai hal-hal yang dapat menghambat dan menurunkan daya saing industri furnitur. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh lima isu utama yang signifikan dapat menurunkan daya saing industri furnitur. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa masalah kebijakan yang dinilai berpengaruh negatif terhadap daya saing komoditas furnitur adalah:

1. Kesulitan dalam mengimpor barang contoh karena adanya perlakuan hampir sama dengan barang impor pada umumnya.
2. Hambatan dalam proses karantina bahan baku yang digunakan industri furnitur.
3. Hambatan tentang kebijakan order minimum BBM
4. Hambatan dalam perdagangan kayu atau produk kayu antar propinsi.
5. Kebijakan daerah dan pajak daerah yang membebani pengusaha furnitur.

Berbagai hambatan kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap industri furnitur di Indonesia karena menimbulkan tambahan biaya (*high cost economy*), menurunkan daya saing dengan kompetitor dari negara lain, dan potensi hilangnya peluang pasar ekspor.

#### 2.1.2 PERTEMUAN KOORDINASI DENGAN SENADA DAN ASMINDO

Pertemuan dengan Senada merupakan pertemuan koordinasi yang membahas mengenai teknis pelaksanaan studi yang berkaitan dengan metode penelitian, review hasil penelitian sebelumnya, target responden, jadwal pelaksanaan interview. Pertemuan dengan ASMINDO di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai upaya untuk menggali informasi dan menghubungkan dengan calon responden yang terpilih.

#### 2.1.3 REVIEW STUDI SEBELUMNYA

Tahapan ini dilakukan sebagai langkah memperoleh gambaran awal mengenai studi. Juga sebagai bahan referensi studi berdasarkan kesamaan kasus dan obyek penelitian. Di samping itu review studi sebelumnya dilakukan dengan maksud menghindari duplikasi penelitian.

#### 2.1.4. DESAIN INSTRUMEN STUDI

Desain instrumen studi digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan implementasi survei yaitu metode pemilihan responden dan kompilasi bahan-bahan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.

#### 2.1.4 FINALISASI INSTRUMEN STUDI

Finalisasi instrumen merupakan tahapan akhir sebelum implementasi studi di lapangan. Tahapan finalisasi instrumen setelah melakukan uji coba atau simulasi instrumen kepada responden bayangan sehingga dapat diperoleh gambaran informasi yang akan diperoleh. Dari uji coba juga diperoleh beberapa tambahan informasi untuk melengkapi instrumen studi.

### **2.1.5 PENENTUAN RESPONDEN**

Responden adalah pengusaha-pengusaha furnitur di Jawa Timur (Surabaya dan Pasuruan) dan Jawa Tengah (Jepara dan Solo Raya) anggota ASMINDO dan Non-ASMINDO yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu responden yang sangat memahami kelima isu yang oleh Senada dan Asmindo.

### **2.1.6 IN-DEPTH INTERVIEW**

*In-depth* interview dimaksudkan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kelima isu yang diangkat dalam penelitian ini. Metode ini digunakan karena sangat efektif untuk mengungkapkan fakta.

### **2.1.7 FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION)**

FGD merupakan upaya konfirmasi hasil wawancara *in-depth* yang telah dilakukan selain itu dimaksudkan membuka informasi tambahan yang sangat mendukung studi ini. FGD dilakukan dengan mengadakan diskusi terbatas kepada sekelompok responden yang terpilih di dua wilayah studi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.

### **2.1.8 PENULISAN DRAFT REPORT**

*Draft report* disusun sebelum melakukan finalisasi laporan akhir. *Draft report* merupakan rancangan awal hal-hal yang akan dituliskan berdasarkan kompilasi informasi dari data sekunder dan *matrix finding* berdasarkan pengelompokan permasalahan dan lokasi studi.

### **2.1.9 REVIEW DRAFT REPORT AWAL MELALUI KEGIATAN WORKSHOP**

Review *draft report* dilakukan dengan melakukan presentasi dan diskusi dengan SENADA, pengusaha, instansi Pemerintah. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh beberapa saran yang sangat mendukung dalam penyusunan laporan akhir studi.

### **2.1.10 FINALISASI LAPORAN AKHIR**

Finalisasi laporan akhir merupakan penjabaran *draft report* dengan menggabungkan semua informasi yang telah diperoleh dari *in-depth* interview, FGD dan hasil workshop di Semarang dan Surabaya.

## **2.2. METODE PENENTUAN RESPONDEN**

Studi ini dalam penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling* digunakan karena metode ini sangat efektif untuk menyaring informasi penting dengan langsung mewawancarai responden kunci atas permasalahan penelitian. Responden yang dipilih adalah responden yang mempunyai banyak informasi mengenai isu-isu kebijakan yang menjadi fokus studi dan perannya bisa sebagai representasi pelaku usaha furnitur yang lain. Dari sejumlah target responden yang akan diwawancarai diperoleh komposisi responden:

1. Jawa Tengah : 7 pengusaha anggota ASMINDO dan 3 pengusaha anggota non ASMINDO
2. Jawa Timur : 2 pengusaha anggota ASMINDO dan 5 pengusaha anggota non ASMINDO

## **2.3 TEKNIK ANALISIS**

Studi ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dalam teknik analisis. Secara deskriptif dengan mengumpulkan data kualitatif berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Secara

kuantitatif menitikberatkan pada pengukuran hasil pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dan data-data sekunder.

## **2.4 DATA**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah data yang terkait dengan perkembangan ekspor dan impor Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan data primer dikumpulkan dengan metode *in-depth interview* yaitu responden terpilih.

### 3. BAGIAN III – TEMUAN STUDI 1: HAMBATAN KEBIJAKAN IMPOR BARANG CONTOH

#### 3.1. ANALISIS KEBIJAKAN BARANG CONTOH

Proses transaksi produk furnitur antara produsen dan pembeli dari luar negeri menggunakan beberapa cara. Produsen furnitur di Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam mendapatkan order dari luar negeri biasanya menggunakan cara-cara sebagai berikut:

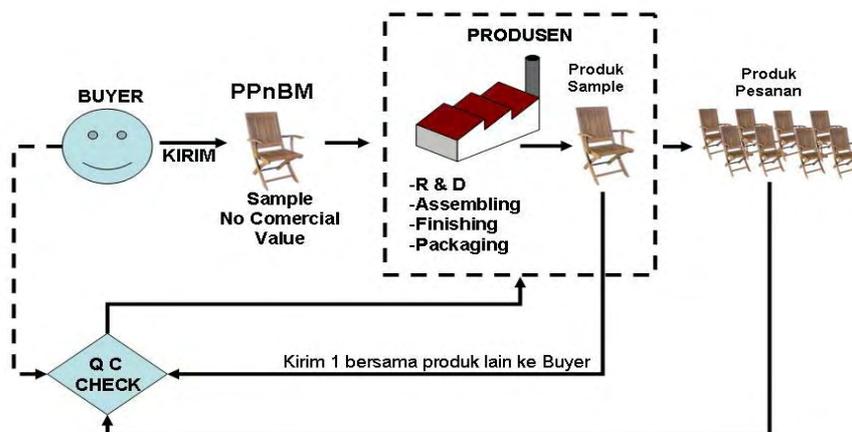
1. Produsen mempromosikan katalog produknya melalui pameran atau *website*.
2. Membuat sampel produk yang kemudian dikirimkan ke pembeli atau pembeli datang melihat langsung sampel di showroom produsen.
3. Pembeli dari luar negeri mengirimkan sampel ke produsen dan produsen membuat contoh produk berdasarkan sampel tersebut.

Setiap perusahaan mempunyai pola yang berbeda-beda dalam mendapatkan order pembelian dari pembeli luar negeri. Produsen furnitur di Jawa Tengah, khususnya eksportir di Jepara, Klaten, Surakarta, Sukoharjo dan Boyolali lebih banyak menggunakan gambar dan spesifikasi teknis dari pembeli di luar negeri. Berdasarkan gambar dan spesifikasi tersebut kemudian dibuat sampel yang dikirimkan kepada pembeli. Melalui cara ini rata-rata diperlukan 2-3 kali pembuatan sampel hingga bisa memenuhi keinginan pembeli luar negeri.

Sedangkan perusahaan furnitur di Jawa Timur khususnya skala besar (pabrik), pembeli dari luar negeri biasanya lebih dulu mengirimkan barang contoh kepada produsen. Berdasarkan sampel yang dikirim, produsen kemudian membuat contoh barang yang diinginkan pembeli. Jika contoh yang dibuat dan harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli akan membuat order pembelian kepada produsen (*purchase order*). Pembeli yang mengirimkan barang contoh kepada produsen furnitur karena adanya tuntutan terhadap keakuratan ukuran, material dan spesifikasi teknis lainnya.

GAMBAR 3.1

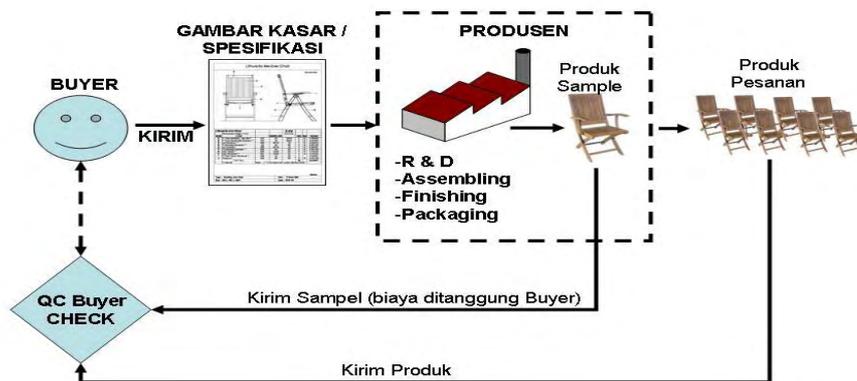
#### PROSES ORDER MENGGUNAKAN BARANG SAMPEL



Perbedaan karakteristik proses order antara produsen/eksportir furnitur di Jawa Tengah dan di Jawa Timur disebabkan perbedaan skala perusahaan dan segmen pasar<sup>2</sup>. *Dari sisi skala perusahaan*, sebagian besar produsen furnitur di Jawa Tengah adalah perusahaan non pabrikan yang menerima barang setengah jadi dari supplier (vendor) dan tinggal finishing produk saja yang dilakukan eksportir. Sedangkan produsen furnitur di Jawa Timur sebagian besar adalah pabrikan yang hampir sebagian besar proses produksi dilakukan sendiri, hanya sebagian kecil komponen produk yang di-sub kontrak. *Dari sisi segmen pasar*, produsen furnitur di Jawa Tengah lebih banyak melayani pembeli luar negeri individual, sedangkan dominasi ekspor furnitur dari Jawa Timur dilakukan oleh perusahaan-perusahaan skala besar yang banyak melayani jaringan toko ritel modern dan produk-produk kelas atas (*high end*).

**GAMBAR 3.2**

**PROSES ORDER MENGGUNAKAN GAMBAR**



Bagi produsen furnitur yang biasa menerima barang contoh, masalah yang dihadapi adalah tingginya biaya yang harus ditanggung ketika memperoleh barang contoh dari calon pembeli. Hal ini disebabkan barang contoh yang dikirimkan oleh calon pembeli ketika masuk ke Indonesia diperlakukan tidak jauh berbeda seperti barang impor pada umumnya. Sehingga barang contoh tersebut harus membayar bea masuk dan berbagai jenis pajak.

Berbagai beban bea masuk dan pajak terhadap barang contoh dikeluhkan produsen furnitur karena bebannya sangat besar dan dikenakan pada produk yang tidak diperdagangkan. Rincian beban bea masuk dan pajak-pajak yang dikenakan pada impor barang contoh adalah:

1. Bea masuk : 10%
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 10%
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) : 40%
4. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Impor : 2,5%

Pemerintah sebenarnya sejak tahun 1997 telah memberikan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang contoh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 140/KMK.05/1997. Dalam kebijakan tersebut atas pemasukan barang contoh diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sepanjang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- Semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru.
- Pengimporannya hanya 3 (tiga) barang untuk 1 (satu) jenis merk/model/type.

<sup>2</sup> Informasi dari beberapa pengurus Asmindo di lokasi studi tentang karakteristik produk dan konsumen masing-masing.

- Bukan sebagai barang yang tujuannya untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan pengembangan kualitas.
- Tidak untuk dipindahtangankan, dijual atau dikonsumsi di dalam negeri.
- Bukan merupakan kendaraan bermotor dan alat berat dalam jenis dan/atau kondisi apapun.
- Wajib disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal realisasi impor.

Meskipun sudah ada keringanan, ada beberapa hal yang masih dikeluhkan produsen furnitur terkait dengan perlakuan barang contoh sebagai barang impor, yaitu:

1. Bahwa keringanan yang diberikan hanya pembebasan bea masuk, tidak termasuk pembebasan beberapa jenis pajak yang tarifnya justru lebih besar dibandingkan bea masuk.
2. Jika ingin mendapatkan pembebasan bea masuk, maka produsen harus mengajukan permohonan pada Direktur Jenderal Bea Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dengan dilampiri: (a) rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan cukai beserta nilai pabeannya; and (b) Rekomendasi dari departemen teknis terkait.

Berdasarkan KMK 140/KMK.05/1997, maka produsen menilai proses pengajuan pembebasan bea masuk cukup rumit dan membutuhkan tambahan biaya karena harus mengajukan permohonan ke pusat, yaitu Direktur Jenderal Bea Cukai yang dilampiri dengan rekomendasi teknis dari departemen/lembaga setingkat departemen yang berada di pusat.

**PROSEDUR IMPOR BARANG CONTOH DI CHINA DAN VIETNAM HANYA  
MEMBUTUHKAN WAKTU 1 HARI:**

Salah satu pengusaha furnitur di Jawa Timur memberikan informasi bahwa di China dan Vietnam hanya dibutuhkan waktu 1 hari bagi produsen yang ingin memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak bagi barang contoh. Kebijakan tersebut hanya diperuntukkan bagi eksportir yang produsen sehingga bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Akibat dari penerapan kebijakan ini, produsen seringkali mendapatkan keluhan dari pelanggan mereka di luar negeri karena mereka tidak mengalami masalah seperti ini jika mengirimkan barang contoh ke supplier di negara lain, khususnya China dan Vietnam. Dibandingkan dengan kebijakan di kedua Negara tersebut tentu saja kebijakan impor barang sampel di Indonesia tidak kompetitif. Buyer tentu memilih order dari Negara lain yang prosesnya lebih mudah dan dengan biaya lebih murah. Dalam impor barang contoh yang menanggung beban biaya biasanya buyer, sehingga jika beban bea masuk dan pajak yang harus ditanggung mahal tentu buyer akan memilih mengalihkan order ke negara lain yang prosedurnya lebih mudah.

Sehingga dalam penerapannya kebijakan tersebut justru cenderung menciptakan inefisiensi karena produsen harus mengurus melalui instansi/departemen teknis terkait di tingkat pusat yang tentu saja memerlukan biaya, baik biaya langsung maupun *opportunity cost*. Berdasarkan pengalaman dari beberapa produsen furnitur di Jawa Timur proses pengurusan pembebasan bea masuk membutuhkan waktu hingga 10 hari efektif. Prosedur impor barang contoh yang dinilai rumit dan membutuhkan waktu serta biaya membuat beberapa produsen kadangkala tidak mengambil barang contoh yang dikimkan pelanggan dari luar negeri konsekuensinya tentu saja mereka kehilangan order.

### **3.2. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN IMPOR BARANG CONTOH**

Kebijakan impor barang contoh yang diperlakukan sebagai sebagaimana produk impor lainnya menimbulkan biaya tambahan hingga 68% dari harga barang dan biaya pengiriman (*freight cost*).

Asumsi yang digunakan untuk menghitung manfaat dan biaya adalah:<sup>3</sup>

1. Negara tujuan yang banyak menggunakan barang contoh dalam order adalah Amerika Serikat.
2. 50% dari total ekspor ke Amerika Serikat melakukan order dengan mengirimkan barang contoh terlebih dahulu.
3. Biaya impor barang contoh berkisar 0,3% - 4% dari nilai order, sehingga digunakan nilai median dari hasil interview sebesar 1,5% dari nilai order.

Dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut dan data ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat, maka dapat dihitung manfaat dan biaya dari kebijakan impor barang contoh. Manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut berupa pemasukan kas negara dari impor barang contoh dari beberapa pos penerimaan :

1. Bea masuk : 10%
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 10%
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) : 40%
4. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 Impor : 2,5%

**TABEL 3.1 — NILAI EKSPOR PRODUK FURNITUR INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT 2006**

HS CODE	PRODUCT	TRADE VALUE
940330	(Office furnitur, wooden, nes)	\$4,535,920
940340	(Kitchen furnitur, wooden, nes)	\$3,835,206
940350	(Bedroom furnitur, wooden, nes)	\$105,713,186
940360	(Furnitur, wooden, nes)	\$267,932,214
<b>Total Trade Value of Furnitur Product</b>		<b>\$382,016,526</b>

Sumber : Comtrade: [www.comtrade.un.org](http://www.comtrade.un.org)

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas dan data nilai ekspor produk furnitur Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2006, maka manfaat yang ditimbulkan berupa penerimaan kas negara berupa bea masuk, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor dengan nilai penerimaan total sebesar : Rp. 26.072.627.900,- (asumsi kurs US\$ 1 = Rp 9.100,-).

Pendapatan pemerintah sebesar Rp 26 milyar tersebut merupakan biaya yang harus dibayar produsen furnitur. Biaya lain yang harus dibayar produsen furnitur karena kebijakan impor barang contoh adalah kemungkinan terjadinya kehilangan order dari pembeli luar negeri karena mereka tidak bersedia dipersulit dengan masalah impor barang contoh termasuk membayar bea masuk dan pajak yang dari negara supplier lain mereka tidak dibebani biaya-biaya tersebut. Estimasi hilangnya potensi order ekspor furnitur Nasional mencapai Rp 485 milyar.

Sedangkan khusus Jatim, pengusaha furnitur Jatim berpotensi kehilangan order ekspor hingga Rp 412 milyar. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada pengusaha furnitur yang diaregasi dengan data sekunder.

<sup>3</sup> Hasil interview dengan Asmino dan beberapa responden indepth interview

### **KASUS HILANGNYA ORDER AKIBAT KEBIJAKAN BARANG CONTOH**

Seorang pengusaha furnitur di Jawa Timur pernah kehilangan order dari buyer Jepang sebesar US\$ 2 juta karena tidak bersedia membayar biaya untuk mengeluarkan sampel dari pelabuhan yang jumlahnya mencapai Rp. 70 juta untuk 14 item barang sampel. Pengusaha tersebut keberatan jika harus membayar berbagai bea masuk dan pajak hingga Rp 70 juta.

Pada kasus lain, produsen furnitur lain di Jawa Timur juga harus membayar bea masuk dan berbagai pajak terhadap 1 jenis barang contoh berupa tempat tidur sebesar Rp. 40 juta.

Kasus terbaru yang ditemukan saat studi, pada pertengahan 2007, produsen furnitur lain di Jawa Timur juga harus membayar bea masuk dan berbagai pajak sebesar Rp. 410.000 untuk 2 item barang sampel senilai Rp 1,8 juta yang dikirimkan calon buyer dari Timur Tengah

Beban terbesar dari jumlah tersebut adalah pengenaan PPN dan PPnBM yang jumlahnya mencapai 50% dari harga barang yang juga diperhitungkan dari harga barang ditambah freight cost. Barang sample yang dikirim tersebut sebenarnya no commercial value, tetapi karena freight cost juga diperhitungkan sebagai dasar pengenaan PPN dan PPnBM, maka beban yang harus ditanggung pengusaha tersebut menjadi mahal.

Terkait dengan kebijakan impor barang contoh, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis terkait kebijakan tersebut, yaitu:

1. Semakin kecil skala usaha semakin besar proporsi beban biaya barang contoh yang harus dibayar.
2. Potensi kehilangan order cukup besar karena pembeli dari luar negeri akan memilih negara suplier yang prosedur birokrasi impor barang contoh lebih mudah dan biaya lebih rendah dengan kualitas produk dan harga yang lebih kompetitif.
3. Pasar ekspor furnitur ke Amerika Serikat sangat besar, ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat hanya 3,1% dari total impor furnitur Amerika Serikat. Perubahan.

Pasar ekspor furnitur ke Amerika Serikat sangat besar, ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat hanya 3,1% dari total impor furnitur Amerika Serikat. Perubahan. kebijakan impor barang contoh bisa menjadi salah satu cara memperluas pasar ekspor, khususnya ke Amerika Serikat.

## 4. BAGIAN IV – TEMUAN STUDI 2: HAMBATAN PROSEDUR KARANTINA BAHAN BAKU

---

### 4.1 ANALISIS KEBIJAKAN PROSEDUR KARANTINA BAHAN BAKU

Berdasarkan hasil FGD yang diselenggarakan SENADA dan Asmindo serta hasil *indepth interview* dengan beberapa pengusaha furnitur di Jawa Tengah dan Jawa Timur terungkap bahwa salah satu masalah yang menghambat daya saing produk furnitur Indonesia terkait dengan masalah bahan baku impor. Bagi produsen-produsen besar di Jawa Timur masalah kebijakan bahan baku impor berhubungan dengan proses karantina kayu atau produk kayu.

Hasil *in-depth* interview kepada beberapa produsen di Jawa Timur banyak mempersoalkan diberlakukannya ISPM No. 15 (*International Standards for phytosanitary measures*)<sup>4</sup> terhadap produk *Medium Density Fibreboard (MDF)* impor yang akan masuk ke Indonesia. Sedangkan berdasarkan kesepakatan internasional produk MDF seharusnya dibebaskan dari keharusan untuk memenuhi ISPM No. 15.<sup>5</sup>

ISPM No 15 merupakan standar internasional di bidang karantina tumbuhan diakui secara internasional. Secara internasional tertuang dalam WTO-SPS Agreement Article 3 yang menjelaskan mengenai harmonisasi standar kesehatan dan pythosanitary menggunakan standar internasional. Pada International Plant Protection Convention (IPPC) Article 1 menjelaskan tugas dan fungsi *national plant protection organization* sebagaimana dijelaskan dalam pasal IV IPPC di Indonesia dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian. Negara-negara anggota WTO dan IPPC berkewajiban mengakomodir ketentuan ISPM 15 dalam menerapkan aturan karantina tumbuhan untuk kemasan kayu.

Kebijakan secara nasional diakomodasi dalam Undang-Undang No 16/1992 pasal 9 dan 10 yang memuat mengenai kebijakan pembebasan karantina untuk produk yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia kecuali disyaratkan oleh negara tujuan. Kebijakan yang terkait dengan kesepakatan internasional tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14/2002 pasal 72 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian no 38/90 pasal 17. ISPM No. 15 disahkan oleh (Food Agriculture Organization) FAO pada bulan Maret 2002 yang memuat ketentuan tentang cara-cara perlakuan dan sertifikasi (*marking*) untuk kemasan kayu (*wood packing*) yang dipergunakan dalam perdagangan internasional.

Tindakan karantina tumbuhan, termasuk perlakuan dan pelabelan untuk kemasan kayu merupakan wewenang petugas karantina tumbuhan. Pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan dilakukan dibawah pengawasan petugas karantina tumbuhan. Latar belakang dipergunakan ketentuan ISPM No 15 diperuntukkan bagi kemasan kayu yang biasanya menggunakan kayu mentah yang rendah mutunya sehingga sangat beresiko menjadi media penyebaran (*Wood borers nematodo fungi*), kayu yang sering digunakan secara berulang-ulang (*recycled*) sehingga tidak jelas asalnya, dan mencegah timbulnya pengaturan secara sepihak yang justru dapat mengakibatkan hambatan yang serius terhadap kelancaran perdagangan internasional.

Yang tergolong dalam kemasan kayu adalah palet, pengganjal (*dunnage*), peti kayu (*crafting*) tong klayu (*drum*), penyangga (*skids*) dan lain-lain sebagai yang terbuat dari kayu mentah Belem diolah). Yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku dalam standar ini adalah kemasan yang terbuat dari kayu

---

<sup>5</sup> New International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 15 on Guidelines for regulating wood packaging in international trade, [www.agriculture.gov.ie](http://www.agriculture.gov.ie), June 2, 2004

yang telah diolah yaitu: kayu lapis (*plywood*), *particle board*, *vener*, sekam kayu (*sawdust*), sampah ketaman kayu (*shaving*) dan lembaran kayu tipis yang ketebalannya kurang dari 6 mm.

Berdasarkan proses produksinya, sebenarnya produk MDF bebas dari proses ISPM No.15. Sebab ISPM No. 15 tidak diajukan untuk material pengepakan yang khusus dibuat dari produk manufaktur hasil olahan kayu seperti plywood, chipboard, fibreboard, oriented strand board (OSB) dan medium density fibreboard (MDF). Kayu yang disusun dengan lem, proses pemanasan dan tekanan maupun kombinasi dari berbagai cara tersebut. Pada kenyataannya pengusaha furnitur masih mengeluhkan adanya kebijakan tersebut.

- **Biaya rata-rata ISPM 15 sebesar Rp 124.000 perkontainer 40’.** Meskipun telah ada kesepakatan internasional bahwa produk MDF tidak memerlukan proses ISPM No. 15, tetapi hal itu tetap harus dilakukan. Jika tahapan tersebut tidak dilakukan, maka MDF impor yang telah tiba di pelabuhan harus tertahan keluar dari pelabuhan ke gudang/pabrik tujuan. Praktek ini menimbulkan biaya yang menjadi beban bagi perusahaan. Hasil *in-depth* interview dengan beberapa perusahaan furnitur menunjukkan bahwa biaya rata-rata ISPM No. 15 yang harus dibayar adalah Rp 124.000,- per kontainer 40’, dengan waktu pengurusan ijin di Balai Karantina sekitar 1-2 hari.
- **Pengusaha mendapat beban demorage cost sebesar 65 – 100 US\$ akibat kebijakan karantina produk MDF.** Jika pengusaha tidak bersedia membayar, maka berakibat pada proses pengeluaran bahan baku impor (MDF) menjadi terhambat. Konsekuensi dari keterlambatan tersebut produsen furnitur lebih memilih mengikuti ‘aturan lapangan’ yang ada dengan tetap membayar biaya ISPM No. 15 daripada barang terlambat keluar dari pelabuhan yang bisa berakibat juga adanya *demorage cost*<sup>6</sup> sebesar US\$ 65 – 100 per hari untuk tambahan sewa kontainer karena melebihi jadual.

Terkait dengan kebijakan impor MDF, pada April 2007, Kepala Badan Karantina Pertanian, memberikan surat kepada salah satu perusahaan kayu di Jawa Timur yang menyatakan: “...*bahwa MDF dengan kode HS 4411 bukan sebagai media pembawa organisme sehingga pemasukan komoditas tersebut tidak memerlukan Phytosanitary Certificate dari negara asal...*”.

Meski demikian, dalam rangka impor komoditas ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pemilik tetap wajib melaporkan kedatangan MDF-nya kepada petugas karantina tumbuhan di unit pelaksana teknis karantina tumbuhan di tempat pemasukan. Sehingga sosialisasi kebijakan yang membebaskan ISPM No. 15 terhadap impor produk MDF, khususnya kepada instansi pemerintah lainnya, khususnya Kantor Bea Cukai masih dipertanyakan.

- **Kebijakan Pembebasan ISPM 15 untuk MDF Belum Diimplementasikan Secara Tegas Antar Instansi Terkait.** Kebijakan yang terkait dengan karantina MDF tersebut ditegaskan Balai Karantina Tumbuhan Tanjung perak, bahwa telah ada pembebasan pengenaan ISPM 15 bagi produk MDF dengan kebijakan KT 14 yaitu pengusaha wajib melaporkan impor MDF-nya ke Balai Karantina. Dengan Form KT-14 tersebut dipakai sebagai sarana untuk mengeluarkan barang MDF dari Bea Cukai.

Tetapi dampak dari kebijakan tersebut mengakibatkan pengusaha harus mengurus bolak balik dari bea cukai ke Balai Karantina untuk mengurus form KT-14 tersebut. Sehingga *opportunity cost* yang ditimbulkan akan semakin besar baik dari segi waktu dan kesempatan produksi.

---

<sup>6</sup>Biaya tambahan sewa container karena melebihi waktu sewa yang direncanakan

Meskipun sudah ada perubahan prosedur bagi MDF yang dibebaskan dari phytosanitari tetapi belum menunjukkan dampaknya terhadap efisiensi waktu pengurusan. Salah seorang pengusaha yang mengalami kasus karantina produk MDF menyatakan: "Saya meminta kejelasan dari bea cukai kalau MDF tidak perlu diperiksa. Bea cukai selalu ngomong bahwa MDF adalah barang titipan Karantina, kalau perlu diperiksa ya diperiksa oleh Karantina."

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada pengakuan secara nasional dan internasional mengenai pembebasan pemeriksaan atas produk MDF tetapi oleh instansi terkait dalam hal ini Balai Karantina dan Bea Cukai aturan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan tegas.

#### 4.2 ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN KARANTINA PRODUK MDF.

Dari hasil temuan beberapa pengusaha yang mengalami dampak dari kebijakan *phytosanitari*, dalam analisis manfaat yang ditimbulkan akibat kebijakan ISPM No. 15 (*phytosanitari*) terhadap produk MDF dari hasil interview tidak ditemukan adanya manfaat sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan secara internasional sudah dinyatakan bahwa proses pembuatan MDF secara teknis telah aman sebagai media pembawa hama tanaman.

Sedangkan dari sisi biaya yang ditimbulkan akibat kebijakan ISPM No. 15 (*phytosanitari*) adalah beban biaya yang harus dibayar pemilik barang. Dari beberapa sumber didapatkan informasi bahwa rata-rata biaya untuk *phytosanitari* Rp 124.000,- per kontainer 40'. Secara agregatif biaya yang harus dibayar industri yang menggunakan MDF impor dihitung dari total nilai impor MDF Indonesia. Beberapa asumsi dasar yang digunakan untuk melakukan agregasi biaya adalah :

1. Harga MDF impor US\$ 260 per m<sup>3</sup>
2. Kapasitas kontainer 40' adalah 18 m<sup>3</sup> per kontainer

**TABEL 3.2 — NILAI IMPOR PRODUK MDF KE INDONESIA 2006**

HS Code	Product	Trade Value
4411	Fibreboard of wood or other ligneous materials	\$20,791,621

Sumber : Comtrade: [www.comtrade.un.org](http://www.comtrade.un.org)

Berdasarkan asumsi di atas, maka volume impor MDF sebanyak 79.967,8 m<sup>3</sup> atau setara dengan 4.443 kontainer. Sehingga secara agregat biaya *phytosanitari* yang harus ditanggung industri yang menggunakan MDF impor sebesar:  $4.443 \text{ kontainer} \times \text{Rp. } 124.000 = \text{Rp } 550.932.000,-$

Selain biaya langsung tersebut, beban biaya yang harus dibayar juga bisa bertambah jika pemeriksaan atau surat keterangan bebas phytosanitari dari balai karantina lambat sehingga menyebabkan pelaku usaha terkena *demorage charge*. Berdasarkan hasil interview beban *demorage charge* berkisar US\$ 65 – US\$ 100 per hari. Jika diasumsikan 40% dari jumlah container yang mengangkut MDF terlambat memperoleh surat keterangan bebas *phytosanitari* sehingga harus terkena *demorage charge*, maka sekurang-kurangnya beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha mencapai Rp. 1,05 milyar. Besarnya biaya *demorage charge* membuat pelaku usaha memilih membayar biaya tambahan agar surat keterangan bebas *phytosanitari* bisa segera keluar.

## 5. BAGIAN V – TEMUAN STUDI 3: HAMBATAN DALAM KEBIJAKAN MINIMUM ORDER BBM

---

Temuan di lapangan menunjukkan kebijakan minimum order BBM tidak berpengaruh bagi para pengusaha furnitur di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penggunaan BBM oleh pengusaha baik digunakan sebagai sebagai bahan campuran pewarna, bahan bakar genset untuk kebutuhan listik dan bahan bakar gergaji.

- **Sebagian besar sentra industri furnitur skala kecil dikecualikan oleh aparat keamanan dalam menggunakan BBM bersubsidi.** Hambatan minimum order bahan bakar pada awalnya diidentifikasi sebagai hambatan yang akan dihadapi oleh pengusaha kecil. Tetapi dalam kenyataannya hambatan tersebut tidak terjadi apalagi dalam bagi industri furnitur yang berada di sentra industri. Pada umumnya pihak-pihak terkait, khususnya aparat keamanan dan Pertamina memberikan toleransi terhadap kebutuhan BBM oleh industri kecil di sentra.

Beberapa contoh pelaku usaha furnitur yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan usaha, antara lain:

1. Pengusaha furnitur di Pasuruan membutuhkan minyak tanah sebanyak 40 liter perbulan sebagai bahan campuran pewarna. Minyak tanah tersebut diperoleh dengan membeli eceran dan hingga saat ini tidak pernah menghadapi masalah dengan pihak berwajib.
2. Pengusaha furnitur di wilayah Solo Raya membutuhkan BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 100 liter per bulan untuk cadangan bahan bakar genset. Suplai solar diperoleh dari suplier dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga di SPBU. Pengusaha tersebut pernah didatangi petugas dari Pertamina, tetapi tidak dipermasalahkan karena jumlah kebutuhannya sangat kecil.
3. Proses produksi pengusaha Jepara membeli solar dari SPBU untuk genset juga tidak mengalami permasalahan karena aparat yang berwenang di Jepara sudah memahami sehingga tidak pernah ada inspeksi dari Pertamina atau kepolisian.

Pengusaha furnitur yang mengalami masalah dengan kebijakan BBM ini sangat sedikit. Bagi pengusaha furnitur skala kecil atau pengrajin di beberapa sentra produksi furnitur, jika memerlukan BBM (kerosene atau solar) diperoleh dari pangkalan/pengecer minyak tanah atau SPBU untuk mendapatkan solar. Sedangkan bagi pengusaha furnitur skala menengah besar memperoleh dengan menggunakan *delivery order* BBM industri dari Pertamina atau agen BBM industri yang telah ditunjuk.

- **Kebijakan BBM bagi Usaha Kecil: ada gap antara permintaan dan penawaran.** Masalah dari kebijakan ini, saat ini adalah ketidakpastian kebijakan. Bagi UKM mereka masih dimungkinkan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Berdasarkan Perpres 09/2006, prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi bagi usaha kecil sangat rumit karena harus ada verifikasi dari instansi berwenang. Di sisi lain minimum order yang bisa dilayani langsung oleh Pertamina sangat besar 8 kilo liter/bulan/unit. Pertamina tidak mau melayani jika jumlahnya kurang dari ketentuan tersebut. Sehingga ada gap antara kebutuhan BBM bersubsidi oleh usaha kecil dengan suplai minimum yang Pertamina bersedia melayani.

Bagi sekelompok usaha kecil di daerah tertentu yang membutuhkan BBM bersubsidi seperti pola di atas, Pertamina menawarkan sistem pool BBM. Kelompok usaha kecil yang berminat dengan

sistem pool BBM bisa mengajukan ke Pertamina dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Perpres 09/2006.

Sedangkan bagi pengusaha furnitur skala menengah-besar kebutuhan BBM harus menggunakan BBM industri. Sebagian besar kebutuhan BBM oleh perusahaan furnitur skala menengah-besar adalah untuk cadangan energi listrik (genset) jika terjadi pemadaman, dengan jumlah kebutuhan BBM yang juga sangat kecil (50-100 liter per bulan). Di sisi lain minimum order untuk BBM industri sebesar 5 kilo liter. Bahkan ada responden yang terakhir membeli BBM industri dari Pertamina 2 tahun lalu, dan hingga saat ini masih tersisa banyak.

Hingga saat ini suplai untuk kebutuhan BBM industri diperoleh dari Pertamina atau agen BBM industri yang ditunjuk Pertamina. Khusus di Jawa Timur saat ini telah ditunjuk oleh Pertamina 17 agen BBM industri. Secara geografis, 17 agen BBM industri tersebut tersebar di:

- |             |           |                |          |
|-------------|-----------|----------------|----------|
| 1. Surabaya | : 10 agen | 4. Tulungagung | : 1 agen |
| 2. Sidoarjo | : 1 agen  | 5. Bangkalan   | : 1 agen |
| 3. Gresik   | : 1 agen  | 6. Banyuwangi  | : 3 agen |

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa distribusi agen BBM industri masih sangat terbatas dan tidak merata di semua daerah di Jawa Timur. Kondisi ini tentu menjadi masalah bagi pengusaha yang membutuhkan BBM industri. Ketersediaan BBM industri yang dibutuhkan sulit diperoleh, di sisi lain bagi yang pengusaha tidak ingin bermasalah dengan aparat keamanan, maka tidak mungkin menggunakan BBM bersubsidi. Akibatnya tentu saja proses produksi di perusahaan pasti terganggu.

## 6. BAGIAN VI – TEMUAN STUDI 4: HAMBATAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KAYU ANTAR DAERAH

---

### 6.1. HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN KAYU DAN PRODUK KAYU ANTAR DAERAH

#### 6.1.1 KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2006 merupakan dasar aturan terbaru tentang penatausahaan hasil hutan. Peraturan ini merupakan pengganti dari Kepmenhut No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 dinilai memberikan peranan yang sangat dominan bagi aparat pemerintah dan menimbulkan berbagai masalah, antara lain biaya tinggi, waktu yang cukup lama sehingga tidak mendorong pertumbuhan sektor riil. Sistem PUHH yang berlaku selama ini masih mencampur adukkan antara hasil hutan yang menjadi aset negara dan aset privat (perusahaan), sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Dalam Kepmenhut No. 126/KPTS-II/2003, seluruh proses dan mekanisme dari hutan (tebangan) sampai di konsumen menggunakan dokumen SKSHH dan bersifat *official assessment*<sup>7</sup>.

Oleh karena itu pemerintah kemudian melakukan deregulasi atas penatausahaan hasil hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006. Maksud penetapan kebijakan PUHH yang baru melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 adalah untuk:

- Menyederhanakan sistem penatausahaan hasil hutan (deregulasi)
- Fokus pada pengamanan aset negara (kayu bulat dari hutan alam negara sebagai bahan baku industri).
- Tidak mencampuradukkan aset negara dengan aset privat dan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap hasil hutan yang telah menjadi aset (milik) perusahaan/ perorangan.
- Petugas kehutanan yang selama ini terkonsentrasi di luar hutan, dapat ditarik ke hulu untuk mengamankan hutan, diantaranya : melakukan verifikasi hasil hutan yang keluar dari hutan.

Sedangkan tujuan dari penetapan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 adalah:

- Obyek PUHH menjadi lebih fokus.
- Memberikan kepastian hukum bagi konsumen/ masyarakat.
- Menekan biaya tinggi.
- Mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- Memberikan penguatan pengawasan di hulu melalui reposisi petugas kehutanan yang selama ini terkonsentrasi di luar hutan.

Revisi PUHH diharapkan dapat memperpendek proses dan mekanisme penerbitan dokumen SKSHH. Penyederhanaan itu dilakukan dengan memberikan peranan dan tanggung jawab kepada

---

<sup>7</sup> Pemeriksaan keabsahan dan penerbitan surat sahnya hasil hutan dilakukan oleh pemerintah (Departemen Kehutanan/Dinas Kehutanan Propinsi).

industri primer hasil hutan kayu (penerbitan dokumen secara *self assessment*<sup>8</sup>) dan melakukan sistem pemeriksaan (audit) tata usaha hasil hutan di hutan (kawasan hutan) dan industri hasil hutan.

Beberapa perubahan mendasar dari Kepmenhut No. 126/2003 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 adalah:

1. Mendefinisikan kembali surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagai "*general term*" dan bukan nama dokumen. Dalam hal ini surat keterangan sahnya hasil hutan dapat berupa semua dokumen yang menyatakan bahwa hasil hutan tersebut sah pada setiap segmen kegiatan (LHC, RKT, LHP, Surat Keterangan Sah Kayu Bulat/SKSKB, Faktur Angkutan).
2. Implementasi dari lacak balak yang sifatnya *mandatory*.
3. Memberlakukan dokumen SKSKB untuk log (kayu bulat) dari hutan alam sampai tempat tujuan atau industri.
4. Sedangkan kayu yang berasal dari hutan tanaman pengangkutannya menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).
5. Semua hasil hutan yang keluar dari industri atau berbentuk kayu olahan, pengangkutannya menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
6. Dokumen Pengganti SKSKB (lanjutan) menggunakan FAKB.
7. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh aparat pemerintah, termasuk pengadaan blankonya (Bagi IUPHHK yang dinilai baik dalam mengelola hutan akan mendapatkan insentif, yaitu penerbitan SKSKB dapat dilakukan oleh Perusahaan).
8. Dokumen faktur angkutan baik kayu bulat atau kayu olahan diterbitkan oleh Perusahaan Pemilik Kayu, termasuk pengadaan blankonya).
9. Dalam rangka pengendalian dan keseragaman, format blanko faktur angkutan ditetapkan Departemen Kehutanan, dengan pengaturan warna sebagai berikut:
  - Propinsi di Jawa dan Madura, Bali, NTB, NTT menggunakan blanko warna putih.
  - Propinsi di Sumatera menggunakan warna blanko kuning.
  - Propinsi di Kalimantan menggunakan warna blanko merah.
  - Propinsi di Sulawesi menggunakan warna blanko biru.
  - Propinsi di Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua menggunakan warna blanko hijau.

### 6.1.2 TATA NIAGA KAYU BULAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tata niaga yang berkenaan dengan kayu bulat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- **Hasil Hutan Alam.** Kayu gelondongan bulat besar dan kecil mengalami alur proses yang sama pada tahapan ini. Pada tahapan awal ini membutuhkan ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah Laporan Hasil Crusing (LHC), membuat buku ukur di tempat pengumpulan kayu (TPn), Laporan Hasil Produksi (LHP) di tempat penimbunan kayu (TPK). LHP disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk mengangkut kayu dari TPn ke TPK dalam satu lokasi HPH, IPK dan HPHH perlu menyertai keabsahan dari Dinas Kehutanan (DKI). Dari TPK ke Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH)/Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) atau dari TPK di luar HPH, IPK, dan HPHH atau dari TPK ke IPKH lain atau dari gudang penampungan ke IPKH harus dilampirkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Daftar Kayu Bulat (DKB). Untuk kayu bulat kecil ditambahkan stempel Kayu Bulat Kecil (KBK) pada SKSKB.

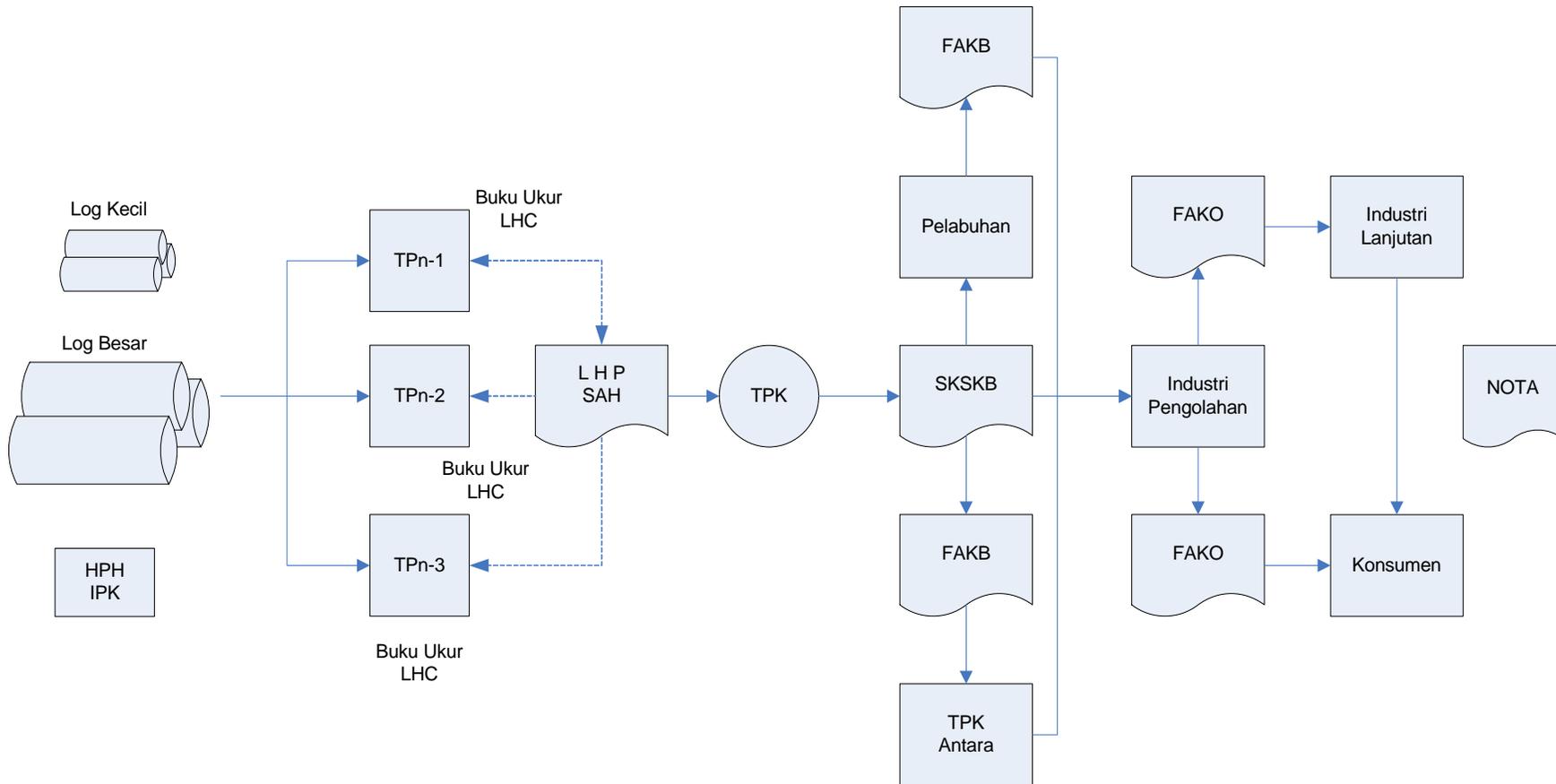
---

<sup>8</sup> Penerbitan surat sahnya hasil hutan dilakukan oleh perorangan perwakilan perusahaan yang telah tersertifikasi.

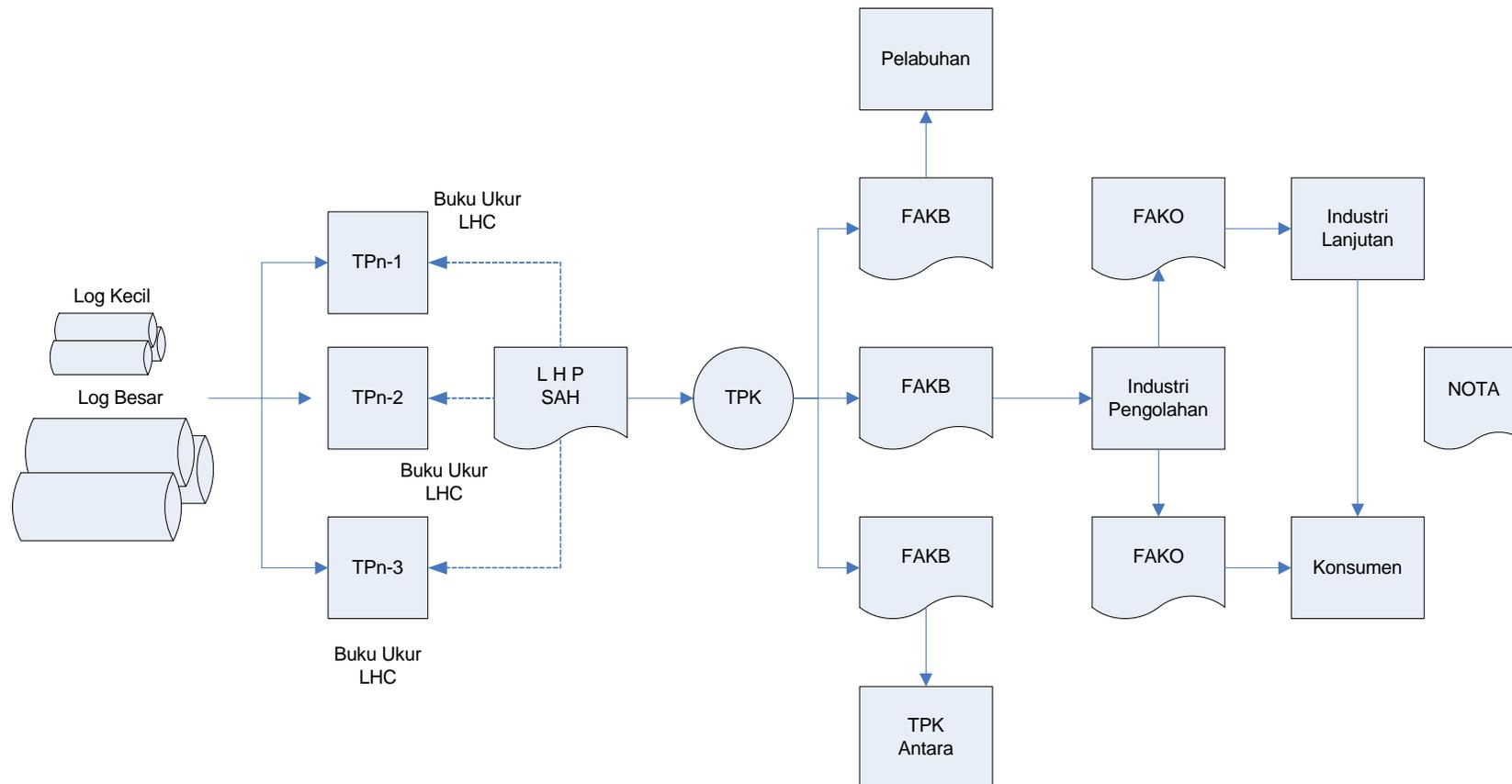
- **Hasil Hutan Hak/Rakyat.** Kayu dari hasil hutan hak/rakyat adalah hasil tanaman masyarakat atau pemilik perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak terdapat pengaturan bagi jenis-jenis tanaman rakyat yang disyaratkan menggunakan dokumen SKAU dalam alur distribusinya. Penggunaan SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan yang berasal dari hutan hak yaitu sengon (*paraseriantbes falcaferia*), kayu kelapa (*cocos nucifera*).

Tujuan dari penggunaan SKAU adalah untuk menertibkan peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat untuk melindungi hak masyarakat. Kayu hasil perkebunan diangkut dari lokasi penebangan ke IPKH/gudang penampungan/dijual wajib disertai Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara di wilayah hasil hutan tersebut diangkut. Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Persyaratan SKAU digunakan untuk dua komoditas hutan hak yang telah disebutkan sedangkan di luar itu wajib menggunakan dokumen FAKB untuk persyaratan kelengkapan dari TPK sampai ke industri pengolahan.

(Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006)



**GAMBAR 6.2. ALUR PERSYARATAN DOKUMEN HUTAN HAK  
(PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.P.51/MENHUT-II/2006)**



### **6.1.3. TATA NIAGA KAYU OLAHAN**

Dokumen angkutan yang wajib dilaporkan dari distribusi TPK Hulu/Antara dan pelabuhan ke Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) diperlukan FAKB (Faktur Kayu Bulat). Selanjutnya proses bagi pemegang ijin IPKT agar dapat mendistribusikan konsumen atau ke Industri Lini wajib menyertakan Faktur Kayu Olahan (FAKO). FAKB dan FAKO dikeluarkan oleh karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan faktur

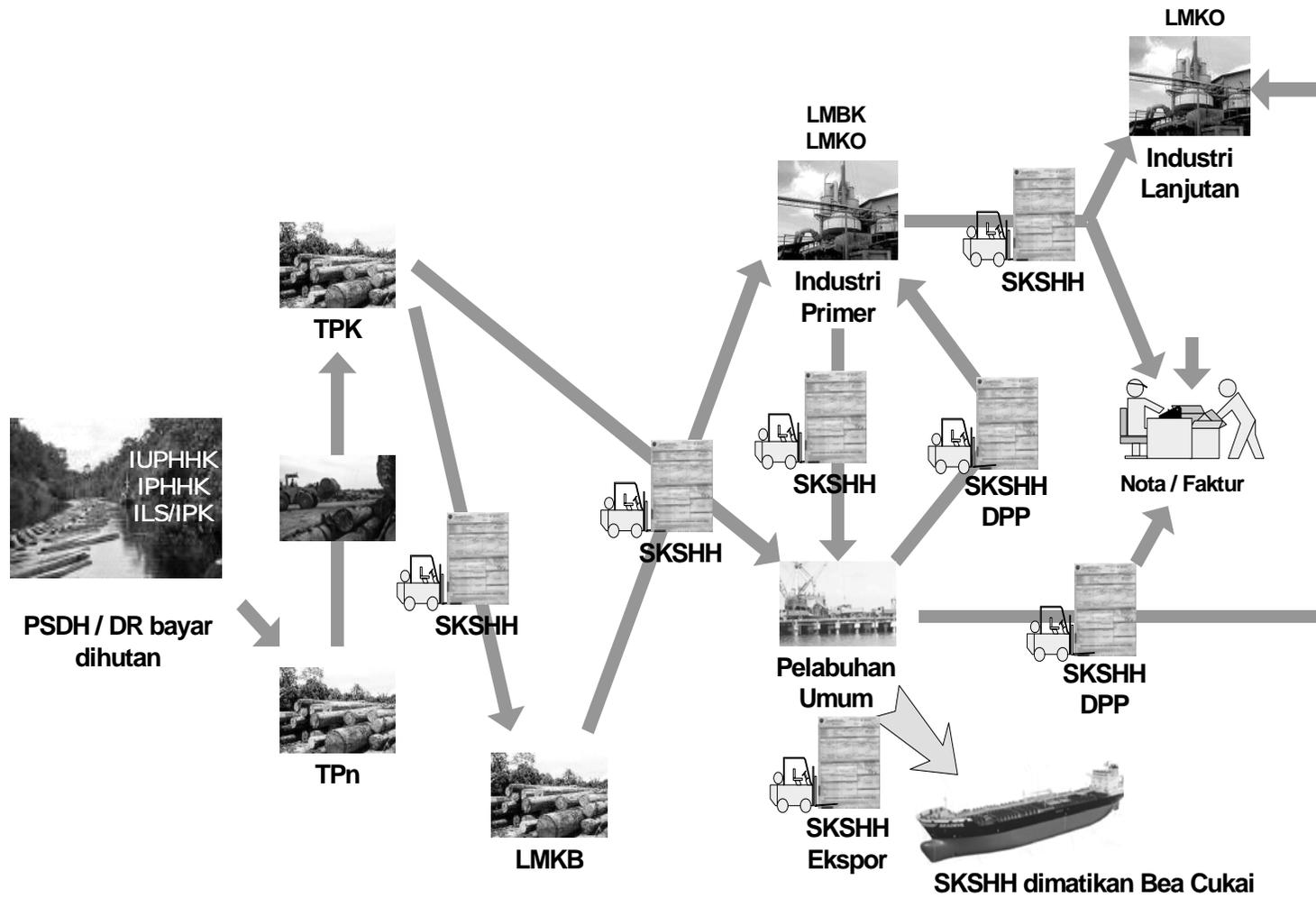
### **6.2. ANALISIS KEBIJAKAN TATA NIAGA KAYU**

Keputusan Menteri Kehutanan No 126/KPTS-II/2003 yang mengatur mengenai penerapan SKSHH sebagai dokumen resmi pengangkutan kayu bulat dinilai tidak efisien. Dokumen SKSHH diberlakukan ketika kayu didistribusikan keluar dari TPK ke TPK Antara sampai ke pelabuhan. Hambatan yang dirasakan pengusaha akibat implementasi SKSHH di lapangan adalah

:

1. Implementasi proses SKSHH berbelit dari segi birokrasi dan persyaratan misalnya blanko SKSHH sering habis.
2. SKSHH yang dikeluarkan Dinas Kehutanan cenderung menyebabkan biaya tinggi.
3. Tenaga ahli dalam pengurusan terbatas sehingga pengusaha harus lama menunggu.
4. Batas berlakunya SKSHH terlalu singkat sehingga berpotensi dipersalkan oleh oknum aparat di jalan. Hal ini mengakibatkan pengusaha terbebani biaya tambahan transportasi bahan baku.

**GAMBAR 6.3. ALUR PERSYARATAN DOKUMEN HUTAN ALAM  
(KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO 126/KPTS-II/2003)**



**TABEL 6.1. ANALISIS KEBIJAKAN TATA NIAGA KAYU DENGAN SKSHH KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO 126/KPTS-II/2003**

NO	PERMASALAHAN KEBIJAKAN	PERMASALAHAN IMPLEMENTASI
1	Proses SKSHH sulit dan berbelit dari segi birokrasi	SKSHH sering menyebabkan ekonomi biaya tinggi
2	Tenaga ahli dalam pengurusan terbatas sehingga pengusaha harus menunggu lama	Batas berlakunya terlalu singkat sehingga menimbulkan masalah oknum aparat di jalan

Dengan adanya penerapan SKSKB, FAKB dan FAKO sebagai dokumen dalam distribusi bahan baku sebagai implementasi Peraturan Menteri Kehutanan P. 55/MENHUT-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara dinilai sangat membantu untuk mengurangi ketidakefisienan tata niaga bahan baku. Instrumen SKSKB dan FAKB masuk dalam alur distribusi kayu alam memberikan keuntungan kepastian hukum bahwa bahan baku tersebut diperoleh dari aset negara, disamping itu ketentuan tersebut memberikan penguatan pengawasan di hulu melalui reposisi petugas kehutanan yang selama ini terkonsentrasi di luar hutan.

- Pengusaha harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 7,000,000 untuk memperoleh sertifikat keahlian penerbitan FAKO.** Menurut peraturan tersebut penerbitan FAKO dilakukan oleh penerbit FAKO di industri pengolahan kayu yang sah dan tempat penampungan yang terdaftar. Sehingga perusahaan kayu dapat mengeluarkan penerbitan dokumen FAKO dengan syarat pengusaha memiliki orang yang telah tersertifikasi untuk menerbitkan FAKO (*self assesment*). Penerbitan FAKO untuk produk kayu dari industri milik Perum Perhutani tidak menjadi masalah karena dapat dilakukan oleh petugas Perum Perhutani. Sedangkan bagi industri kayu rakyat maka dalam peraturan itu mensyaratkan agar pengusaha kayu dapat menerbitkan FAKO sehingga pengusaha harus mengirimkan staf perusahaannya untuk ditraining. Permasalahannya sekarang adalah pengusaha kayu yang mayoritas UMKM sangat keberatan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, yaitu Rp 7,000,000.

Kebijakan FAKO mulai diimplementasikan terhitung per 1 Januari 2007, tetapi Dinas Kehutanan memberikan tenggat waktu sampai dengan 30 Juni 2007. Pada masa tenggat waktu tersebut Dinas Kehutanan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk mengikuti diklat penerbitan FAKO. Diklat tersebut diselenggarakan oleh asosiasi yang bergerak di industri kayu yaitu *Indonesia Sawmill Workworking Association (ISWA)* dan Balai Pemantauan dan Pemanfaat Hutan Produksi.

Kemudian implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 51 /MENHUT-II/2006 Tentang penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak memberikan keuntungan batasan hasil hutan kayu dari hutan hak dengan maksud untuk menertibkan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan untuk melindungi hal masyarakat dalam pengangkutannya sehingga diperoleh kepastian hukum bagi hasil hutan yang merupakan aset perseorangan. Penerbitan SKAU sangat mudah dibandingkan dengan FAKO yaitu penerbitan SKAU atas persetujuan Kepala Desa/Lurah asal kayu diangkut.

- Pengusaha mendapat beban tambahan biaya akibat celah implementasi dokumen lacak balak yang tidak jelas dan tidak konsisten.** Hambatan perdagangan kayu dan furnitur masih dihadapi oleh pengusaha baik di Jawa Tengah. Hasil FGD telah mendukung hasil temuan dalam

*in-depth* interview di Jepara. Pengusaha Jepara dalam distribusi bahan baku masuk ke wilayah Jepara masih terbebani biaya-biaya tambahan.

**TABEL 6.2. TAMBAHAN BIAYA DISTRIBUSI BAHAN BAKU KE JEPARA**

No	Lokasi	Biaya
1	Dari Jawa Barat - Jepara	Rp 200,000
2	Dari Jawa Timur - Jawa Tengah	Rp 25,000
	- lewat Rembang - Jepara	Rp 250,000
	- lewat Pati - Jepara	Rp 25,000 - Rp 75,000

Tambahan biaya ini dikarenakan masih terdapat celah implementasi dokumen lacak balak hasil hutan yang tidak jelas dan tidak konsisten. Perubahan kebijakan dari Kepmenhut 126/KPT-II/2003 yang menggantikan SKSHH dengan SKSKB, FAKB dan FAKO (Permenhut 55/Menhut II/2006) tidak terlalu berpengaruh terhadap berbagai pungutan tersebut. Meskipun demikian, pengusaha-pengusaha lain yang ada di wilayah Solo dan Jawa Timur tidak begitu mengeluhkan hal tersebut karena secara riil hal tersebut telah jauh berkurang dari keadaan sebelumnya.

**TABEL 6.3. ANALISIS KEBIJAKAN TATA NIAGA KAYU DENGAN FAKOBPERATURAN MENTERI KEHUTANAN P. 55/MENHUT-II/2006**

NO	PERMASALAHAN KEBIJAKAN	PERMASALAHAN IMPLEMENTASI
1	Bagi industri kayu rakyat disyaratkan untuk mengikuti pelatihan. Biaya yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan cukup mahal Rp 7,000,000	Hingga saat studi ini dilakuakn, pengusaha kayu masih harus membayar pungutan-pungutan tersebut, meskipun saat itu sudah diterapkan Permenhut PP 55/Menhut II/2006 yang sudah menggantikan SKSHH dengan SKSKB, FAKB dan FAKO
2	Pelatihan tidak setiap waktu ada	Pengusaha khususnya pedagang kayu masih menganggap dokumen baru tersebut tidak berbeda dengan SKSHH sehingga mereka lebih baik membayar pungutan daripada diberhentikan petugas.

### 6.3. HAMBATAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU ANTAR DAERAH

- **Bea ekspor yang dibebankan kepada pengusaha dinilai tidak transparan.** Seperti halnya bahan baku, produk jadi furnitur pun juga mengalami hambatan distribusi. Dalam hal bea ekspor yang dikenakan, pengusaha di Jawa Timur menilai tidak transparan sehingga terkesan tidak ada aturan baku mengenai tarif yang dikenakan. Ada pengusaha yang mengantisipasi dengan mengundang petugas bea cukai untuk melihat langsung proses pemasukan produknya ke dalam kontainer untuk menghindari masalah inspeksi di pelabuhan, yang justru menimbulkan biaya lebih banyak. Konsekuensinya pengusaha tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 500,000 per kontainer.
- **Pengusaha harus mengalokasikan biaya tambahan untuk distribusi produk kayu antar daerah.** Hasil *in-depth* interview dengan salah satu pengusaha furnitur di Solo Raya terungkap bahwa setiap kali pengiriman kontainer dari Solo ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang biasanya perusahaan transportasi yang disewa perusahaan furnitur harus mengalokasikan sebesar Rp 500,000 per kontainer untuk berbagai pungutan, baik di jalan

maupun di pelabuhan. Kasus di Jawa Timur, salah satu pengusaha di Jawa Timur yang mengirimkan produknya ke Bali harus mengalokasikan sekitar Rp 100,000 untuk berbagai pungutan di jalan dari total biaya transportasi Rp 2,500,000.

Sedangkan dari hasil *indepth interview* dengan beberapa pengusaha di Jepara dapat disimpulkan titik-titik daerah yang rawan adanya biaya tambahan dari distribusi produk furnitur. Wilayah yang sangat signifikan terjadinya biaya siluman tersebut adalah distribusi ke Surabaya yaitu sampai Rp 1,000,000. Selanjutnya transportasi dari Jepara menuju Tanjung Mas pengusaha harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 200,000 ditambah biaya saat lewat Welahan antara Rp 10,000 – Rp 15,000. Dari Jepara menuju Semarang dapat melalui 2 jalan yaitu lewat Welahan dan lewat Kudus. Meski biaya tambahan yang akan dikeliurakan nilainya sama tetapi pengusaha lebih memilih lewat Welahan dengan alasan jarak tempuh yang lebih pendek sehingga dapat menghemat bahan bakar.

**TABEL 6.4. TAMBAHAN BIAYA DISTRIBUSI PRODUK DARI JEPARA**

No	Lokasi	Biaya
1	Dari Jepara-Semarang (Tanjung Mas)	Rp 200,000
	- lewat Welahan (lebih dekat)	Rp 10,000 - Rp 15,000
	- lewat Kudus	Rp 10,000 - Rp 15,000
2	Dari Jepara-Jakarta	Rp 150,000
3	Dari Jepara-Surabaya (tergantung kondisi aparat)	Rp 5,000 - Rp 1000,000

**Penurunan biaya THC diikuti dengan kenaikan biaya-biaya lain.** Masalah lain di luar permasalahan perdagangan antar daerah adalah masalah hambatan di pelabuhan dan hal tersebut meresahkan eksportir adalah ditemukan kasus penurunan *Terminal Handling Cost*. Penurunan THC dirasakan oleh sebagian besar pengusaha furnitur menjadi hal yang sia-sia karena penurunan biaya tersebut justru disertai dengan kenaikan biaya-biaya lain misalnya *document fee* dan *commission fee*<sup>9</sup>.

#### 6.4 ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN KAYU DAN FURNITUR ANTAR DAERAH

Beban biaya tambahan yang harus dibayar eksportir dari Solo ke Tanjung Mas di jalan dan pelabuhan sekitar Rp 125 juta - Rp 300 juta per bulan. Hasil *indepth interview* dengan pengusaha furnitur di Solo Raya terungkap bahwa setiap kali pengiriman kontainer dari Solo ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang biasanya perusahaan transportasi yang disewa perusahaan furnitur harus mengalokasikan sebesar Rp 500,000 per kontainer untuk berbagai pungutan, baik di jalan maupun di pelabuhan.

**TABEL 6.5. ANALISIS BIAYA AGREGAT AKIBAT PUNGUTAN TERHADAP PENGUSAHA FURNITUR SOLO RAYA PADA SAAT DISTRIBUSI BARANG KE PELABUHAN TANJUNG MAS**

Nilai Pungutan (ribu)	Peak Season			Low Season			Total Pungutan dalam
	Jumlah	Waktu	Sub Total	Jumlah	Waktu	Sub Total	
Rp 500	600	6	Rp 1.800	250	6	Rp 750	Rp 2.550

<sup>9</sup> Komponen biaya tambahan baru yang harus dibayar oleh pengusaha kepada perusahaan pelayaran setelah kebijakan penurunan THC

- **Biaya tambahan yang menjadi beban eksportir Jepara saat distribusi produk dari Jepara – Tanjung Mas Rp 210.000 per kontainer.** Sedangkan dari hasil *in-depth* interview dengan beberapa pengusaha di Jepara dapat disimpulkan titik-titik daerah yang rawan adanya biaya tambahan dari distribusi produk furnitur. Wilayah yang sangat signifikan terjadinya biaya tambahan tersebut adalah distribusi ke Surabaya yaitu sampai Rp 1,000,000. Selanjutnya transportasi dari Jepara menuju Tanjung Mas pengusaha harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 200,000 ditambah biaya saat lewat Welahan antara Rp 10,000 – Rp 15,000. Dari Jepara menuju Semarang dapat melalui 2 jalan yaitu lewat Welahan dan lewat Kudus. Meski biaya tambahan yang akan dikeluarkan nilainya sama tetapi pengusaha lebih memilih lewat Welahan dengan alasan jarak tempuh yang lebih pendek sehingga dapat menghemat bahan bakar.

**TABEL 6.6. ANALISIS BIAYA AGREGAT AKIBAT PUNGUTAN PRODUK KAYU DARI JEPARA KE TANJUNG EMAS**

Tahun	Volume Ekspor	Kontainer (40')	Beban Pungutan (Rupiah)
2004	61,817,687.75	20,606	4,327,238,142
2005	57,490,449.61	19,163	4,024,331,472
2006	55,765,736.12	18,589	3,903,601,528

- **Pengusaha di Jepara mengeluarkan biaya pungutan untuk produk kayu sebesar Rp 3,903,601,528.** Dengan menggunakan data volume ekspor per-tahun dari Disperindag dapat diestimasi nilai beban pungutan yang harus dibayar oleh pengusaha furnitur di Jepara untuk perjalanan dari Jepara menuju pelabuhan Tanjung Emas dengan asumsi biaya pungutan tetap selama 3 tahun dan muatan 1 kontainer 40' sama dengan 3 – 3.5 ton. Sampai dengan akhir tahun 2006 pengusaha Jepara harus mengeluarkan beban pungutan untuk produk kayu sebesar Rp 3,903,601,528 untuk jumlah kontainer (40') sebanyak 18,589.
- **Penurunan Terminal Handling Cost (THC) justru menimbulkan biaya tambahan lainnya bagi eksportir.** Masalah lain di luar permasalahan perdagangan antar daerah adalah masalah hambatan di pelabuhan dan hal tersebut meresahkan eksportir adalah ditemukan kasus penurunan *Terminal Handling Cost*. Penurunan THC dirasakan oleh sebagian besar pengusaha furnitur menjadi hal yang sia-sia karena penurunan biaya tersebut malahan disertai dengan kenaikan biaya-biaya lain misalnya *document fee* dan *commission fee*. Dari informasi *in-depth* diketahui bahwa untuk container 20' biaya *Terminal Handling Cost* turun nilainya dari 150 US\$ menjadi 95 US\$ tetapi muncul kenaikan biaya lain misal *document fee* 10 -25 US\$.

## 7. BAGIAN VII – TEMUAN STUDI 5: HAMBATAN YANG TERKAIT PERATURAN PUSAT DAN DAERAH

---

### 7.1. KEBIJAKAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH BAGI INDUSTRI FURNITUR

Berdasarkan hasil *in-depth* interview mengenai peraturan daerah dan pajak daerah, sebagian besar menyatakan bahwa peraturan daerah dan pajak daerah tidak terlalu menjadi beban bagi kegiatan usahanya. Hal tersebut karena jika ada biaya yang harus dibayar nilainya sangat kecil. Beberapa pengusaha furnitur memberikan informasi bahwa mereka biasanya mencadangkan biaya lain-lain dalam struktur biaya produksinya sebesar 2%. Salah satu alokasi dari biaya lain-lain tersebut sebagai cadangan jika ada biaya tak terduga, seperti sumbangan dan pajak atau retribusi daerah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

- **Rasionalitas pengenaan pajak daerah lebih dipertanyakan oleh pengusaha furnitur dibandingkan nilai nominal pajak yang harus dibayar.** Permasalahan peraturan daerah, khususnya mengenai pajak/retribusi daerah yang dikeluhkan pengusaha furnitur bukan karena beban yang harus dibayar, tetapi karena mereka harus membayar pajak/retribusi daerah yang seharusnya tidak dikenakan pada kegiatan usahanya. Nilai nominal pajak/retribusi daerah yang harus dibayar memang nilainya sangat kecil dan tidak signifikan dalam mempengaruhi biaya produksi, tetapi prosedur dan dasar pengenaan pajak/retribusi yang dipersoalkan.

Terkait dengan kebijakan daerah mengenai pajak/retribusi daerah, maka keluhan pengusaha furnitur mengenai masalah ini adalah:

1. Dasar pengenaan pajak/retribusi daerah tidak jelas, penentuan obyek pajak oleh pemda tidak didukung data yang valid dan cenderung asal-asalan.
2. Meskipun pemda mempunyai dasar dalam pengenaan pajak/retribusi daerah, seringkali petugas menghitung beban pajak/retribusi dengan dasar yang tidak konsisten dalam menghitung satu obyek pajak dengan obyek pajak yang lain.

#### **KASUS DASAR BEBAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK RASIONAL**

Pengusaha furnitur di Jawa Timur harus membayar pajak reklame dengan nilai relatif kecil Rp 54.375,-. Pengusaha sebenarnya tidak keberatan jika memang dia harus membayar pajak yang menjadi kewajibannya, masalahnya pengusaha tersebut tidak pernah mempunyai satupun media pun di lingkungan pabrik yang menunjukkan reklame perusahaan, termasuk tidak ada papan nama perusahaan di area pabrik. Ketika masalah tersebut dilontarkan kepada petugas dari Pemda, dengan enteng petugas tersebut menyatakan bahwa karena sudah membayar pajak reklame, maka sebaiknya perusahaan memanfaatkan dengan memasang reklame di area pabrik tanpa dikenakan pajak reklame lagi.

Pengusaha furnitur di Jawa Tengah ketika mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) dikenakan biaya hingga Rp 6 juta. Pengusaha tersebut merasa keberatan karena dasar pengenaan biaya retribusi IMB didasarkan pada luas bangunan saja, sedangkan dari sisi jenis bangunan tidak diperhitungkan. Padahal dalam ketentuan tentang retribusi IMB tersebut jenis bangunan juga diperhitungkan. Keberatan pengusaha furnitur tersebut karena pemda hanya menghitung beban retribusi dari luas bangunan dan hal ini akan berdampak pada beban pajak bumi dan bangunan (PBB) yang nantinya harus dibayar. >>>

Kasus lain yang dialami pengusaha furnitur di Jawa Timur adalah pengenaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 50,625 perbulan. Menurut surat pemberitahuan pajak dari Pemda Kabupaten setempat dasar pengenaan adalah pemakaian daya listrik oleh yang termasuk kategori 14-200 KVA. Pada kenyataannya perusahaan menggunakan beban listrik sebesar 700 KVA. Pengusaha tersebut menilai bahwa cara pemda mengenakan beban pajak tidak didukung data dan cenderung ngawur dengan tujuan semata-mata agar ada tambahan PAD.

## 7.2. KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

- **Tarif PBB naik 30% setiap tahun.** Selain beberapa masalah tentang kebijakan daerah mengenai pajak/retribusi daerah. Terdapat juga kebijakan dari instansi pusat (Kantor Pajak) yang sangat membebani semua pelaku usaha, termasuk pengusaha furnitur. Kebijakan tersebut terkait dengan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus dibayar pengusaha dengan cara menaikkan nilai jual obyek Pajak (NJOP). Kenaikan tersebut berkisar 30% setiap tahun. Upaya Kantor Pajak menaikkan NJOP tersebut dinilai tidak rasional karena nilai NJOP jauh di atas harga pasar. Kenaikan tarif tersebut hanya menunjukkan kepentingan Kantor Pajak untuk menaikkan penerimaan PBB. Fenomena kenaikan tarif PBB ini terjadi hampir di semua daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi lokasi studi.

Permasalahan kenaikan tarif PBB tersebut merupakan fenomena umum yang banyak dipertanyakan pengusaha di Jawa Timur. Meskipun kebijakan ini ditentukan oleh Kantor Pajak, tetapi Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kenaikan tarif ini karena 90% pendapatan dari PBB kembali ke daerah.

## 7.3 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH BAGI INDUSTRI FURNITUR

Berdasarkan hasil *in-depth* interview baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah ditemukan persoalan perda yang terkait pajak daerah maupun retribusi yang ditujukan pada perusahaan furnitur. Dari temuan tentang kebijakan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi menunjukkan bahwa beban biaya tambahan sangat kecil, yaitu 0,3%. Sedangkan pengusaha selama ini mencadangkan biaya untuk hal-hal seperti ini sebesar kurang dari 2%. Sehingga dengan adanya beban baru berupa pajak daerah dan retribusi dampaknya tidak signifikan bagi industri manufaktur.

Bagi para pengusaha, masalah kebijakan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi nilainya tidak signifikan terhadap biaya total perusahaan. Tetapi masalahnya adalah adanya persepsi negatif dari kalangan pengusaha furnitur tentang upaya pemerintah daerah yang lebih berorientasi PAD dibandingkan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

## 8. BAGIAN VIII – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

---

### 8.1. KESIMPULAN

1. Kemudahan yang diberikan pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan 140/KMK.05/1997 hanya dalam bentuk pembebasan bea masuk sedangkan beban pajak-pajak lainnya (PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 barang impor) tetap harus dibayar. Masalah lain dari kebijakan tersebut adalah prosedur mendapatkan pembebasan bea masuk untuk impor barang contoh harus diajukan ke Direktur Jenderal Bea Cukai disertai rekomendasi dari departemen teknis terkait (Ditjen Agrokimia Departemen Perindustrian). Prosedur ini tentu sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, akibatnya perusahaan juga harus membayar biaya tambahan untuk kontainer (*demorage charge*) yang tarifnya progresif hingga barang keluar dari pelabuhan.
2. Persoalan impor barang contoh yang menjadi masalah lebih banyak dihadapi oleh perusahaan furnitur besar (pabrik) dibandingkan oleh eksportir kecil maupun menengah. Beban bea masuk dan berbagai pajak yang dibebankan barang contoh menjadi masalah utama terkait persoalan impor barang contoh. Penghitungan beban bea masuk dan pajak yang turut memperhitungkan biaya pengiriman (*freight cost*) semakin memperberat beban yang harus dibayar para pengusaha.
3. Kebijakan tentang pembebasan *phytosanitari certificate* bagi MDF impor yang digantikan dengan hanya sebatas pelaporan kepada Balai Karantina membuat upaya penyederhaan kebijakan tidak jelas dan masih menimbulkan inefisiensi. Pengusaha yang mengimpor MDF masih harus ke Balai SKarantina untuk memperoleh surat keterangan bebas *phytosanitari*, sehingga masih berpotensi menimbulkan tambahan biaya.
4. Dalam studi ini tidak ditemukan hambatan mengenai minimum order BBM, karena karakteristik industri furnitur yang bersifat cluster dan sudah cukup terlayani melalui SPBU bersubsidi. Sedangkan pelayanan untuk BBM industri masih sangat terbatas. Kebijakan ini masih belum transparan dan menimbulkan ketidaknyaman dalam berusaha, di satu sisi mereka membutuhkan BBM industri tetapi sulit untuk memperoleh dan di sisi lain jika menggunakan BBM bersubsidi, pelaku usaha dihadapkan pada masalah dengan aparat penegak hukum.
5. Perubahan kebijakan yang lebih menyederhanakan tata niaga kayu dengan Permenhut 55/Menhut II/2006 tidak terlalu berpengaruh terhadap hambatan dalam distribusi kayu dan produk kayu. Deregulasi melalui kebijakan tersebut belum mampu mengurangi biaya tambahan yang harus dibayar pengusaha kayu/furnitur pada saat proses distribusi bahan baku maupun hasil produksi.
6. Peraturan daerah yang menjadi beban pengusaha furnitur saat ini relatif jauh lebih baik dibandingkan di awal penerapan desentralisasi. Saat ini yang kadangkala masih menjadi persoalan adalah ketentuan yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak/retribusi yang tidak jelas dan tidak konsisten.

### 8.2. REKOMENDASI

#### 8.2.1. REKOMENDASI TERKAIT POLICY REVIEW

1. Perlu dilakukan perubahan keputusan menteri keuangan No. 140/KMK.05/1997 agar bisa memberikan keringanan yang lebih komprehensif untuk impor barang contoh, terutama dari beban pajak sehingga kebijakan ini bisa bersaing dengan kebijakan impor barang contoh dari negara pesaing lain.

2. Prosedur dalam mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak juga harus disederhanakan, dengan di-desentralisasi ke Kantor Wilayah dan Dinas Propinsi sehingga prosesnya bisa lebih cepat sehingga perusahaan juga terhindar dari biaya tambahan di pelabuhan.
3. Kebijakan tentang pembebasan *phytosanitari certificate* bagi MDF impor dan produk kayu lainnya harus ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian sehingga bisa dijadikan dasar bagi Bea Cukai dalam mempercepat prosedur impor MDF dan bahan baku lain yang dibutuhkan industri furnitur. Kebijakan pelaporan impor MDF ke balai karantina yang saat ini berlaku juga harus dihapus karena tidak ada manfaat yang diperoleh dan justru menimbulkan biaya tambahan.

### **8.2.2. REKOMENDASI TERKAIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

1. Pertamina perlu memperbanyak agen BBM industri di daerah-daerah lain yang belum ada agar industri yang membutuhkan bisa lebih mudah memperolehnya.
2. Perlu dipertimbangkan pemanfaatan SPBU sebagai salah satu *service point* penjualan BBM industri sehingga pembelian dalam skala kecil bisa terlayani.
3. Diperlukan sosialisasi lebih intensif tentang kebijakan tata niaga kayu yang baru, Permenhut PP. 51 dan 55/Menhut II/2006 yang sudah menggantikan SKSHH dengan SKSKB, FAKB dan FAKO. Ketidaktahuan pengusaha akan peraturan ini menyebabkan pungutan liar terhadap distribusi kayu dan produk kayu masih terjadi.
4. Pengenaan biaya pelatihan untuk tenaga ahli tersertifikasi yang berhak mengeluarkan FAKO perlu ditinjau. Tenaga ahli tersebut sebenarnya menggantikan peran petugas Dinas Kehutanan yang selama ini mengeluarkan SKSHH. Oleh karena itu beban biaya pelatihan sebaiknya dibebankan pada anggaran negara.
5. Departemen Kehutanan harus meningkatkan frekuensi pelatihan untuk tenaga ahli perusahaan yang berhak mengeluarkan FAKO dengan lokasi yang lebih dekat ke sentra-sentra industri kayu agar lebih terjangkau oleh pengusaha kayu atau pengusaha furnitur.
6. Perlunya sinkronisasi antar instansi di daerah, khususnya pemda, otoritas pelabuhan dan kepolisian dalam mengurangi beban pungutan yang membebani industri furnitur, Dinas Perindustrian dan Badan Penanaman Modal bisa menjadi *leading institution* dalam mengatasi *high cost economy* di industri furnitur.

## KEPUSTAKAAN

---

- BEI NEWS, Nov-Des 2004, "Industri Mebel dan Furnitur: Saatnya Menyapa Pasar Eropa", Edisi 23 Tahun V.
- BPS Jatim, (beberapa tahun terbitan), Laporan Perekonomian Jawa Timur, Surabaya.
- Chilman, "Tantangan dan Peluang ASMINDO Dalam Rangka Menghadapi Daya Saing Global dan Penetrasi Pasar", Materi Presentasi Workshop Senada-USAID di Surabaya tanggal 5 September 2007.
- Damanik, K.I., 2002, "Studi Kebijakan Sub Sektor Furnitur", PKPEK CEMSED, ASEMHAKE dan USAID. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, (beberapa tahun terbitan), Laporan perekonomian Jawa Tengah, Semarang.
- Djamhari, "Menuju Grand Design Strategi Pengembangan Jawa Tengah Sebagai Pusat Industri Furniture Indonesia Melalui Pendekatan Cluster", Materi Presentasi Workshop Senada-USAID di Semarang tanggal 22 Agustus 2007.
- Hira, H & Jaskara, D. P, Nov 2006, "Kajian Singkat Produk Wooden dan Garden Furnitur Indonesia", BEI.
- IFC Pensa, "Market Assesment of SME Sustainable Timber Potential in Indonesia", PT Lingkungan Duta Consult.
- PKPEK, Asemhaki dan USAID, 2002, "Kajian Hambatan Usaha Sub Sektor Furnitur".
- Sulhadi, "Materi Bahasan Workshop Studi Hambatan dan Daya Saing Industri Furnitur di Jawa Tengah", Materi Presentasi Workshop Senada-USAID di Semarang tanggal 22 Agustus 2007.
- Susilo, "ISPM 15: Guideline for Regulating Wood Packaging Material in International Trade", Materi Presentasi Workshop Senada-USAID di Surabaya tanggal 5 September 2007.

[www.agriculture.gov.ie](http://www.agriculture.gov.ie)

[www.comtrade.un.org](http://www.comtrade.un.org)

**SENADA – Indonesia Competitiveness Program**

BRI II Tower, 8<sup>th</sup> Fl, Suite 805

Jl. Jendral Sudirman No. 44 – 46

Jakarta 10210

[www.senada.or.id](http://www.senada.or.id)